Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bojonegoro dalam Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(Studi pada Satuan Tugas perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Dalam Bidang Ilmu Politik

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh:

NELLY DAHLIA

NIM. I71217038

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

JULI 2021

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini, **saya:**

Nama : Nelly Dahlia

NIM : I71217038

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi **: Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Kabupaten Bojonegoro Dalam Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak (Studi pada Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020)"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan **gelar** akademik manapun.
2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3) Apabila skripsi ini di kemudian hari **terbukti atau** dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala bentuk hukum yang terjadi.

Surabaya, 27 Juni 2021

Nelly Dahlia

NIM. I71217038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memberikan bimbingan, memberikan arahan dan memeriksa data terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Nelly Dahlia

NIM : I71217038

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : **"Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Kabupaten Bojonegoro Dalam Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Studi pada Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020)"** Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Ilmu Politik

Surabaya, 27 Juni 2021

Pembimbing,

Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP. 196909071994032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Nelly Dahlia judul "**Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Kabupaten Bojonegoro Dalam Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Studi pada Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020)"** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada 8 Juli 2021

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

(Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si)
NIP. 196909071994032001

Penguji II

(Laili Bariroh, M.Si)
NIP. 197711032009122002

Penguji III

(Dr. H. Ahmad Suyuthi, M.Ag., M.Si)
NIP. 197407212006041001

Penguji VI

(M. Zimamul Khaq, M.Si)

NIP. 198212022015031002

Surabaya, 08 Juli 2021

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D.
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nelly Dahlia
NIM : I71217038
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Politik
E-mail address : nellydahlia58@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bojonegoro dalam Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Studi pada Satuan Tugas perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2021

Penulis

(*Nelly Dahlia*)

ABSTRAK

Nelly Dahlia, 2021. *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bojonegoro dalam Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Studi pada Satuan Tugas perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender, Implementasi Kebijakan, Satgas PPA

Munculnya isu kesenjangan gender menjadi permasalahan yang serius dalam pembangunan negara, khususnya pemerataan kesejahteraan sosial. Berbagai upaya nasional yang dituangkan dalam bentuk legitimasi bertujuan untuk mendorong agar peran, kedudukan dan kualitas perempuan lebih meningkat, sehingga dapat mewujudkan kesetaraan gender, khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya dengan melibatkan kaum perempuan sebagai salah satu *stakeholder* aktif dalam menanggani permasalahan yang berkaitan dengan gender, melalui progam Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bojonegoro, yang dianalisis menggunakan Konsep Pengarusutamaan Gender dengan 7 prasyarat pelaksanaan PUG (2) Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak pada satuan tugas perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, yang di deskripsikan dan dianalisis menggunakan Teori Model Implementasi Kebijakan Publik George Edward III sebagai tolak ukur keberhasilan pembentukan Satuan Tugas PPA pada program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik *purposive sampling.* Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Yang kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dan triangulasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tujuh prasyarat yang menjadi acuan kelembagaan PUG di Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya berjalan secara optimal.2) Tanggung jawab pemerintah dalam mendukung PUG dibuktikan melalui program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui satuan tugas perlindungan perempuan dan anak sudah efektif diterapkan di masyarakat sesuai konsep model implementasi kebijakan Edward III.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Nelly Dahlia, *Implementation of Gender Mainstreaming Policies in Bojonegoro Regency in the Empowerment and Child Protection Program (Study on the Women and Children Protection Task Force in 2020)*

Keywords: *Gender Mainstreaming, Policy Implementation, Women and Children Protection Task Force*

The emergence of the issue of gender inequality has become a serious problem in the development of the country, especially the distribution of social welfare. Various national efforts as outlined in the form of legitimacy aim to encourage the role, position and quality of women to increase further, so as to realize gender equality, especially in Bojonegoro Regency. One of them is by involving women as one of the active stakeholders in dealing with issues related to gender, through the Women's Empowerment program and child protection.

The purpose of this study is to analyze and describe two problem formulations, namely: (1) How is Gender Mainstreaming in Bojonegoro Regency, which is analyzed using the Concept of Gender Mainstreaming with 7 prerequisites for the implementation of Gender Mainstreaming (2) Implementation of gender mainstreaming policies in the Women's Empowerment and child protection program in the task force for the protection of women and children in Bojonegoro Regency in 2020, which was described and analyzed using the George Edward III Public Policy Implementation Model Theory as a measure of the success of the establishment of the PPA Task Force in the Women's Empowerment and child protection program. The researcher used descriptive qualitative research method using purposive sampling technique. Collecting research data using interview techniques, observation, literature study and documentation. Then, data processing was carried out using the Miles and Huberman interactive model and triangulation.

The results of this study indicate that: 1) The seven prerequisites that become the reference for PUG institutions in Bojonegoro Regency have not fully run optimally. 2) The government's responsibility to support gender mainstreaming is proven through women's empowerment programs and child protection through the task force for women and children protection that has been effectively implemented in the community according to the concept of policy implementation Edward III.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI vii
PERNYATAAN PUBLIKASI viii
ABSTRAK viii
ABSTRACT x
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR GRAFIK xvii
DAFTAR TABEL xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Definisi Konseptual 10
1. Pengarusutamaan Gender (PUG) 10
2. Implementasi Kebijakan 11
3. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA) 11
F. Sistematika Pembahasan 12
BAB II KAJIAN TEORITIK 13
A. Penelitian Terdahulu 13
B. Kajian Teoritik 16
1. Pengarusutamaan Gender 16
2. Kebijakan Publik 21
C. Kerangka Analisis 27
BAB III METODE PENELITIAN 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Jenis Penelitian 28
B. Subyek Dan Lokasi Penelitian 28
C. Teknik Pengumpulan Data 31
D. Teknik Analisis Data 32
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 33
F. Tahap-Tahap Penelitian 34
BAB IV DATA DAN ANALISIS 35
A. Kondisi Fisik dan Karakteristik Wilayah Penelitian 35
1. Gambaran Umum 35
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 36
B. Potret Organisasi 44
C. Pengarusutamaan Gender dan Implementasinya 50
1. Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 50
2. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Satuan Tugas perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 63
BAB V PENUTUP 76
DAFTAR PUSTAKA 78
***Lampiran I* 82**
***Lampiran II* 105**
***Lampiran III* 108**
***Lampiran IV* 112**
***Lampiran V* 115**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pembangunan Gender dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2018-2023 5
Gambar 2.1 Kerangka Analisis 28
Gambar 3.1 Model Analisis Data Miles dan Huberman 33
Gambar 4.1 Peta batas administrasi Kabupaten Bojonegoro 35
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAPPEDA 45
Gambar 4.3 Struktur Organisasi DP3AKB 46
Gambar 4.4 Strategi Pengarusutamaan Gender 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2017-2020 8
Grafik 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro 37
Grafik 4.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro, JawaTimur dan Nasional 37
Grafik 4.3 Angka Buta Aksara Kabupaten Bojonegoro tahun 2015-2017 38
Grafik 4.4 Rata Rata Lama sekolah kabupaten bojonegoro tahun 2017-2019 berdasarkan jenis kelamin 38
Grafik 4.5 Harapan Lama sekolah kabupaten bojonegoro tahun 2017-2019 berdasarkan jenis kelamin 39
Grafik 4.6 Peran Perempuan dalam Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2017 41
Grafik 4.7 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan Nasional 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Berbasis Gender Tahun 2019.....6
Tabel 1.2 Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2019.....6
Tabel 1.3 Indikator kesehatan (AKI, AKB, dan Prevalensi stunting) kabupaten bojonegoro tahun 2020) 7
Tabel 1.4 Jenis-Jenis Kasus Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro 8
Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu.....13
Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2017 36
Tabel 4.2 Angka Kematian Bayi Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2017 39
Tabel 4.3 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Bojonegoro 40
Tabel 4.4 Jumlah dan Persentase Stunting di Kabupaten Bojonegoro.....41
Tabel 4.5 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terkait Anak Tahun 2017 42
Tabel 4.6 Visi,Misi, Tugas dan Fungsi BAPPEDA 44
Tabel 4.7 Visi, Misi, Tugas dan Fungsi DP3AKB.....45
Tabel 4.8 Struktur Organisasi Bojonegoro Institute 47
Tabel 4.9 Daftar program Kerja Bojonegoro Institute 48
Tabel 4.10 Visi Misi Bojonegoro Institute.....49
Tabel 4.11 RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 51
Tabel 4.12 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2020 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesetaraan dan keadilan gender sudah menjadi perhatian dunia sejak abad ke-21. Munculnya isu kesenjangan gender menjadi permasalahan yang serius dalam pembangunan negara, khususnya pemerataan kesejahteraan sosial. Untuk mengantisipasi munculnya diskriminasi gender, pada tahun 1978 PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) memunculkan sebuah perjanjian Internasional yaitu *Convention on the Elimination off all forms of discrimination againt women* (CEDAW).[1] Dalam agama islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual,warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Hujuraat:13

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚاِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui,Maha teliti."

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwasanya secara teoritis Al-Qurán mengandung prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tatanan implementasinya seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.[2] Sebagai bentuk pelaksanaan ratifikasi tersebut dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan UU RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Selanjutnya Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2020 mengesahkan Intruksi Presiden Nomor 9 terkait

[1] Mufidah Cholil. *Profil Gender Kabupaten Bojonegoro tahun 2011*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim, 2011) hal. V

[2] Sarifa Suhra, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-qurán dan implikasinya terhadap hokum Islam*, (Jurnal:Al-Ulum,Volume 13 No.2,2013) hal. 374

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.[3] Tahun 2014 Pemerintah Republik Indonesia juga merumuskan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kemudian di tekankan lagi dengan UU Nomor 21 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Di tingkat daerah, KEMENDAGRI (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) mengesahkan PERMENDAGRI No. 67 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Disusul oleh KEMENPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Menteri Keuangan (Kemenkeu) Dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2013 mengeluarkan SE tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Tahun 2005 pengarusutamaan gender sudah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang terdapat pada misi kedua yang berbunyi *"Mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk sasaran pokok adalah berhubungan dengan kualitas SDM berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Penduduk seimbang."*[4]

Berbagai upaya nasional yang dituangkan dalam bentuk legitimasi bertujuan untuk mendorong agar peran, kedudukan dan kualitas perempuan lebih meningkat, sehingga dapat mewujudkan kesetaraan gender di tingkat nasional. Namun, Produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan berjalan seimbang jika tidak ada strategi pengarusutamaan gender yang terintegrasi dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu perencanaan dan pembangunan yang responsif gender harus dibangun mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Agar arah kebijakan pengarusutamaan gender dapat dirasakan manfaatnya oleh laki-laki dan perempuan.[5] Kajian-kajian tentang gender pada pembangunan dan perwujudan kesetaraan gender

---

[3] Mufidah Cholil. *Ibid* hal. V

[4] Rr. Rina Antasari, *Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender di Pemerintah Kota Palembang*, (Jurnal:Al-Maiyyah Nomor 1,2017) hal.134

[5] Bryan Christo Wongkar, dkk. *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Tahun 2018*. (Jurnal: Administrasi Publik volume V nomor 086,2019)hal. 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama ini dibidang politik, ekonomi, sosial dan hukum masih berada dalam posisi yang termarginalkan.

Pada tahun 2019 menjadi fenomena baru dengan munculnya virus yang berpotensi menular hingga mematikan yang hingga saat ini tersebar di seluruh penjuru negara. Virus tersebut bernama Covid-19 (Coronavirus disease-2019). Kehadiran virus Covid-19 berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari segi kesehatan,ekonomi, sosial dan politik. Kondisi seperti ini bisa memperburuk ketimpangan gender. Hal ini dikarenakan tingkat produktivitas dan partisipasi angkatan kerja semakin menurun, terutama pada perempuan. Terlebih, pada kondisi pandemi tingkat sensitifitas perempuan lebih tinggi.[6] Padahal sebelum ada pandemi covid-19, masih terdapat permasalahan-permasalahan ketimpangan gender di Indonesia yang belum terselesaikan. Bersumber dari data Pembangunan Manusia berbasis gender tahun 2019 yang diambil berdasarkan jenis kelamin, jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) penduduk laki-laki berada pada angka (75,96%) dan penduduk perempuan berada pada angka (69,18%). Yang artinya pembangunan nasional belum sepenuhnya responsif gender.[7]

Hambatan lain yang dialami oleh perempuan pada masa pandemi COVID-19 yaitu berkaitan dengan pendampingan dan pengasuhan bagi anak selama belajar dari rumah atau *School From Home* (SFH) yang mengakibatkan perempuan memiliki beban ganda sebagai ibu yang mengurus anak-anak sekaligus orang yang memiliki pekerjaan diluar rumah. Hal ini berpotensi terciptanya kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap anak, perempuan dan kelompok rentan lainnya, akibat tidak memiliki kesiapan mental dalam menjalani beban ganda. Semenjak digaungkannya program kegiatan *School From Home* (SFH) di berbagai daerah di Indonesia, banyak laporan yang masuk di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai 14 Maret-22 April 2020, yaitu 105 terkait kasus kekerasan pada perempuan, dari jumlah kasus tersebut, ada 106 korban kekerasan yang diantaranya 67 jiwa mengalami Kekerasan dalam rumah tangga. KEMENPPPA menghimbau untuk menangani berbagai hambatan diatas, dengan diperlukannya intervensi dan kerja sama semua

---

[6] Wenham, C., Smith, J., Morgan, R., & Group, W. *COVID-19: the gendered impacts of the outbreak. The Lancet, 395, 846–848.* https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32990-3. Diakses pada 16 oktober 2020

[7] Badan Pusat Statistik. *[IPG] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2010-2019.* https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15 /1568/-ipg-indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010- 2019.html. Retrieved May 29, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang tepat sasaran dan efektif untuk memerangi pandemi dengan cara memberdayakan dan memanfaatkan potensi perempuan serta pemenuhan hak-hak anak.[8] Hal ini sejalan dengan arah kebijakan RPJMN tahun 2015-2019 yaitu meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Maka dari itu, Peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang sudah memiliki peraturan yang ada kaitannya gender. Di antaranya Peraturan Daerah (Perda) No. 10/2011 Tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bojonegoro. Dengan adanya Perda tersebut, tahun 2015 baru di bentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG). Yang disusul dengan adanya Peraturan daerah no. 2/2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2018-2023. Berikut adalah gambaran strategi, arah kebijakan dan program pembangunan kabupaten bojonegoro misi ke-4

[8] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pentingnya Peran Perempuan Sebagai Kekuatan Bangsa Perangi Covid-19*,http://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2646/pentingnya-peran-perempuan-sebagai-kekuatan-bangsa-perangi-covid-19, dipublikasikan pada Jum'at, 24 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.1 Pembangunan Gender dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2018-2023

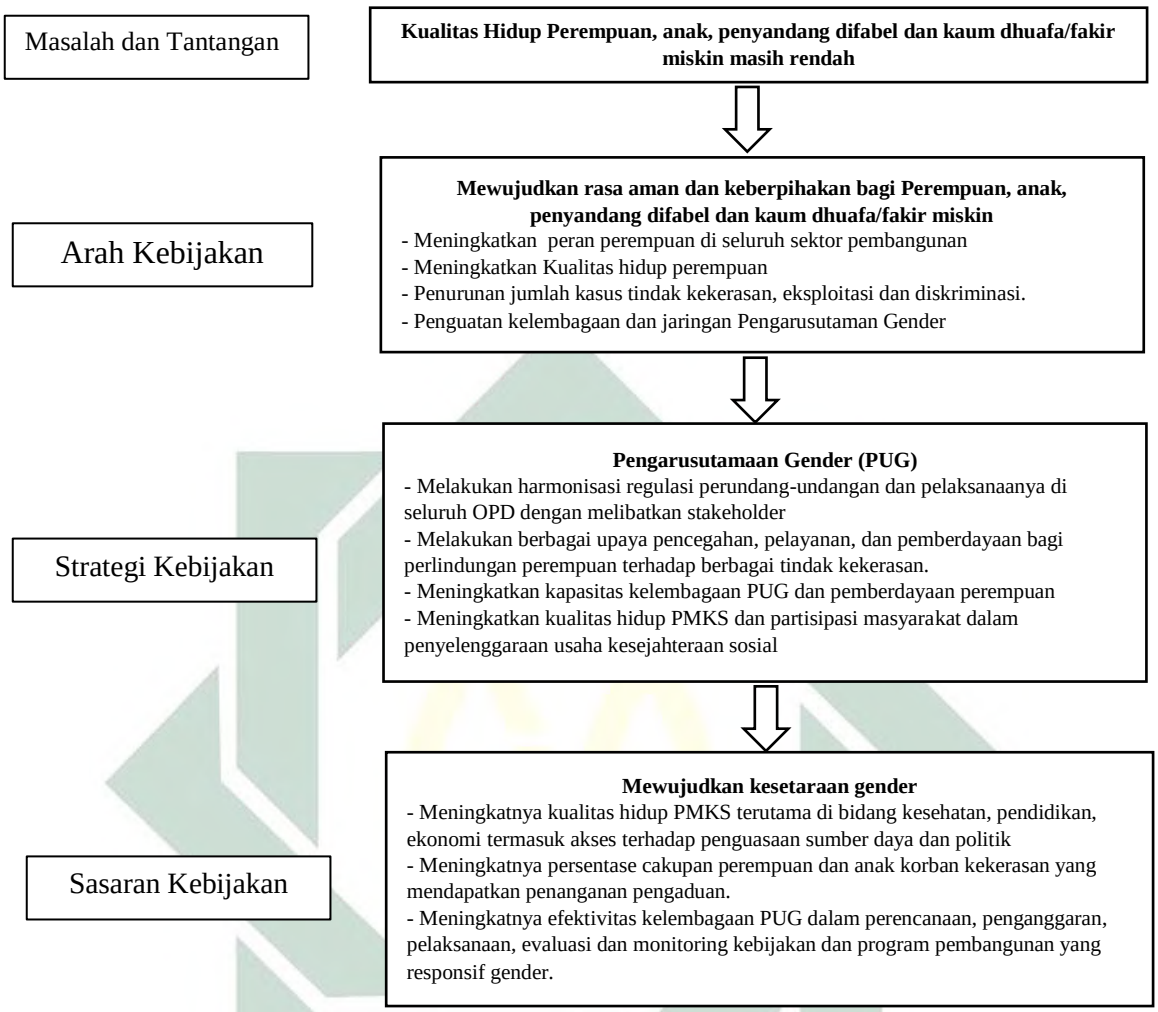

Upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Bojonegoro ini belum dibarengi dengan adanya regulasi tentang Pengarusutamaan Gender. Meski demikian, pada tahun 2018 KEMENPPPA memberi sebuah penghargaan untuk kategori Madya kepada kabupaten Bojonegoro berupa penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Artinya Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender yaitu: 1) Komitmen pemimpin, 2) Kebijakan pemerintah, 3) Kelembagaan, 4) Sumber Daya dan Anggaran, 5) Data terpilah berupa Sistem Informasi dan Bahan Informasi, 6) Metode dan Tool (Alat), dan 7) Peran Serta Masyarakat. Hal tersebut mengartikan bahwa pelaksanaan PUG di Kabupaten Bojonegoro sudah cukup baik, dikarenakan pada tahun sebelumnya juga mendapatkan penghargaan yang sama. Namun, persoalan terselubung terkait kesenjangan gender masih menjadi momok bagi pemerintah kabupaten bojonegoro. Berikut adalah data Pembangunan Manusia Berbasis Gender Kabupaten Bojonegoro:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Berbasis Gender Tahun 2019

Kabupaten/ Kota	**Angka Harapan Hidup**		**Harapan Lama Sekolah**		**Rata-rata Lama Sekolah**		**Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan**		**IPM**		**IPG**
	(tahun)						**(ribu rupiah PPP)**				
	L	**P**	**L**	**P**	**L**	P	**L**	**P**	**L**	**P**	
BOJONEGORO	69,35	73,25	12,28	12,41	7,72	6,51	15.125	8.634	73,38	66,03	89,98

Tabel 1.2 Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2019

Kabupaten/ Kota	**Keterlibatan Perempuan di Parlemen**	**Posisi Strategis Perempuan**	**Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan kerja**	**IDG**
	(persen)			
BOJONEGORO	10,00	43,80	26,44	55,44

Sumber: BPS, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*

Berdasarkan paparan data diatas menunjukkan bahwa dari segi pembangunan, perempuan masih tertinggal. Namun, Berbagai permasalahan terkait ketimpangan gender bukan semata-mata terjadi akibat belum dikaitkannya isu gender secara menyeluruh dalam pembangunan. Akan tetapi, disebabkan oleh faktor struktural dan kultural yang nantinya akan berdampak pada pembangunan. Secara struktural/kelembagaan minimnya sensitifitas aktor pengambil kebijakan dalam menangani isu gender. Menurut Himmah (dalam Resya Famelasari 2021:128) yang menjadi permasalahan terkait gender yaitu kasus kekerasan seksual yang masih tinggi, banyaknya kasus perceraian, pernikahan dibawah umur, dan kesehatan perempuan. Secara kultural/budaya, masih melekatnya praktik budaya patriarki di Indonesia, terutama di kabupaten bojonegoro yang masih kental dengan budaya tersebut, salah satunya praktik pernikahan dini. Bersumber dari Pengadilan Agama data tahun 2020 terdapat 612 pasangan dibawah umur, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya hanya mencapai angka 199 kasus. Kenaikan pernikahan tersebut terhitung sebesar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

207,5%.[9] Faktor penyebab terjadi pernikahan dini karena kultur yang masih melekat pada benak sebagian penduduk kabupaten bojonegoro yang beranggapan bahwa sekolah hanya untuk menggugurkan kewajibannya. Praktik-praktik yang terdapat pada masyarakat sosial inilah nantinya yang akan berdampak pada produk pembangunan. Contohnya yang sampai sekarang ini masih menjadi isu yang belum tertuntaskan yaitu AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Bayi) dan Stunting. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa AKI Kabupaten Bojonegoro mencapai 28 Ibu meninggal atau 161,8 (per 100.000 kelahiran hidup). AKB juga mencapai 138 balita atau 7,97 (per 1.000 Kelahiran Hidup). Sedangkan, prevalensi Stunting pada tahun yang sama mencapai 4,61%.

Tabel 1.3 Indikator kesehatan (AKI, AKB, dan Prevalensi stunting) kabupaten bojonegoro tahun 2020)

Indikator	**Jumlah**
AKI per 100.000 kelahiran hidup	161,8
AKB per 1.000 kelahiran hidup	7,97
Stunting	4,61%

Penanganan terkait masalah perempuan dan anak yang sangat mendesak belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan di kabupaten Bojonegoro. Kendati demikian, beberapa upaya-upaya untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten bojonegoro, salah satunya terbentuknya Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) pada tahun 2019 yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah daerah yang berfungsi membantu pemerintah dalam menangani kasus/masalah terkait perempuan dan anak yang pelaporannya kepada organisasi layanan perempuan dan anak. Satgas PPA ini merupakan paket kebijakan program prioritas unggulan pemerintah kabupaten bojonegoro ke-9 yaitu Lingkungan ramah perempuan,anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa dan taman penitipan anak. Yang terdapat 1.600 anggota Satgas

[9] Dan Kuswan, Sepanjang 2020, *di Kabupaten Bojonegoro Terdapat 612 Pernikahan di Bawah Umur*, https://kumparan.com/beritabojonegoro/sepanjang-2020-di-kabupaten-bojonegoro-terdapat-612-pernikahan-di-bawah-umur-1uwIEDMgeqx/full, Diakses pada 8 januari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terbentuk tingkat terendah, yaitu dusun hingga tingkat kabupaten. Menurut Kepala OPD Dinas DP3AKB Adie Witjaksono, pembentukan satuan tugas PPA ini harapannya bisa menangani pengaduan dan mensosialisasikan terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap kaum marginal.[10] Namun yang terjadi pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan yang ditangani oleh DP3AKB Kabupaten Bojonegoro masih terdapat 61 kasus kekerasan. Justru ada peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 17,31% dari tahun 2019 yang berada di angka 52 kasus. Padahal tahun 2018 sudah mengalami penurunan dari tahun 2017 yang berjumlah 42 kasus menjadi 35 kasus kekerasan. Berikut adalah rinciannya:

Grafik 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2017-2020

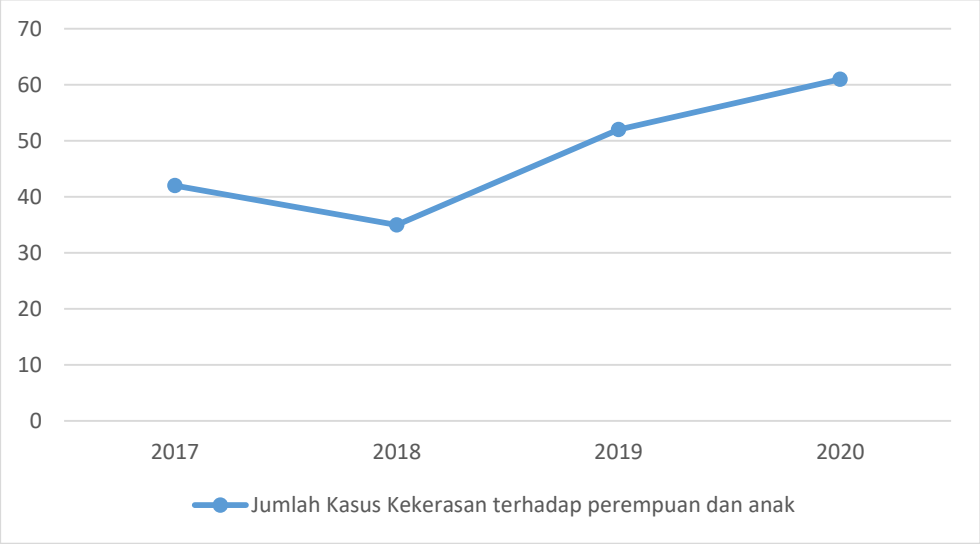

Tabel 1.4 Jenis-Jenis Kasus Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro

Jenis kasus	**Tahun**			
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kekerasan Fisik	3	3	3	14
Kekerasan Psikis	10	10	12	4
Kekerasan Ekonomi	5	2	2	7
Kekerasan Seksual	14	12	17	21
Kekerasan lain-lain	10	8	18	15

Sumber: kumparan.com

[10] Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana, *Bu Anna Kukuhkan 1.600 Satgas PPA*. http://dp3akb.bojonegorokab.go.id/berita/baca/32, received 8 januari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari dua permasalahan yang terjadi di kabupaten bojonegoro yaitu kasus perkawinan anak dibawah umur dan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, Adanya Satgas PPA diharapkan mampu mendorong akselerasi peningkatan kualitas hidup perempuan dalam program pemberdayaan perempuan, terutama kelompok perempuan yang ada di desa dengan memposisikan mereka sebagai salah satu stakeholder aktif. Untuk itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bojonegoro dalam Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Studi pada Satuan Tugas perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengarusutamaan gender di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pengarusutmaan gender pada program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada satuan tugas perlindungan perempuan dan anak tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pengarusutamaan gender di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yang menjadi gambaran latar belakang terbentuknya satuan tugas perlindungan perempuan dan anak
2. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak pada satuan tugas perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Bojonegoro tahun 2020

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Pribadi

   Penelitian bisa menjadi sarana untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan penalaran bagi peneliti melalui aplikasi teori-teori yang didapatkan dari materi perkuliahan.
2. Bagi Akademisi

   Penelitian diharapkan bisa memberikan referensi, rekomendasi dan studi kepustakaan untuk penelitian sejenis serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagi Praktisi

   Diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat luas terkait kajian-kajian gender yang terutama masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah salah satu unsur penelitian yang mendeskripsikan ciri khusus suatu konsep yang akan diteliti dengan fungsi sebagai batasan agar penelitian lebih terfokus. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, sesuai dengan judulnya yaitu Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bojonegoro dalam Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Studi pada Satuan Tugas perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020), maka dapat dikemukakan beberapa variabel, antara lain:

1. Pengarusutamaan Gender (PUG)

   PUG (*Gender Mainstreaming*) yaitu sebuah strategi dalam pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kata setara serta adil yang dituangkan ke dalam kebijakan maupun program-program kerja pemerintah yang mengintegrasikan berbagai pengalaman sosial, kebutuhan masyarakat, aspirasi masyarakat hingga permasalahan laki-laki dan perempuan yang dituangkan melalui perencanaan pembangunan, pelaksanaan, hingga sampai monitoring dan evaluasi dari seluruh program dan kebijakan di berbagai kehidupan sosial masyarakat.[11]

   Terdapat Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender, salah satunya komitmen dari Pemerintah Daerah berupa aturan tertulis yang bersifat mengatur (*reggeling*) dan mengikat untuk menciptakan seluruh komponen daerah dalam melaksanakan pencapaian pengarusutamaan gender. Kabupaten Bojonegoro yang notabenenya sebagai *leading sektor* berkomitmen dalam mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dibuktikan melalui keputusan bupati bojonegoro Nomor 188/228/KEP/412.11/2015 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bojonegoro serta menuangkan strategi PUG ke dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2018-2023 untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, menurunkan angka kekerasan, eksploitasi perempuan dan anak serta mengurangi diskriminasi kaum marginal dengan cara menguatkan

[11] Mufidah Cholil, Op,.Cit,.Hal.18-19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) yang direfleksikan ke dalam produk-produk kebijakan seperti RENSTRA hingga RENJA SKPD.[12]

2. Implementasi Kebijakan

kebijakan publik ialah serangkaian langkah terstruktur yang dijalankan oleh para aktor politik, kelompok, maupun masyarakat untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di lingkup masing-masing. Dengan tujuan terwujudnya kemaslahatan bersama. Pada pelaksanaanya membutuhkan upaya-upaya dari para aktor politik yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dituangkan ke dalam program kerja. Terdapat program strategis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memberdayakan kaum perempuan sampai ke tingkat desa, melalui proses perekrutan masyarakat, khususnya perempuan untuk membantu pemerintah untuk menangani permasalahan perempuan dan anak yang tergabung dalam Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA). Untuk memperdalam studi implementasi kebijakan, Penelitian ini berfokus pada perilaku para pelaksana program yaitu anggota satuan tugas perlindungan perempuan dan anak yang bertanggung jawab atas program kerja terhadap target sasaran. Yang juga mempertimbangkan beberapa aspek seperti hubungan antar pemangku kepentingan dari segi politik, ekonomi dan sosial yang memiliki keterlibatan dengan program kerja. Dalam hal ini, kekuatan jaringan ini juga sangat berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan baik itu berdampak positif maupun dampak negatif.[13] Dengan demikian, pemerintah memiliki posisi strategis dalam proses perumusan kebijakan, mulai dari persiapan, perencanaan, penentuan hingga tahap pelaksanan kebijakan.

3. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA)

Berdasarkan Permen PPPA 6/2017 tentang Satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak (SATGAS PPA) merupakan sebuah satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang untuk menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke organisasi layanan perempuan dan anak. Perlindungan

[12] Rr. Rina Antasari, Op,Cit.,Hal.138
[13] Ibid.,Hal.19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yang dimaksudkan yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Keterlibatan masyarakat dalam menangani masalah perempuan dan anak merupakan salah satu prasyarat Pengarusutamaan Gender yang digunakan pemerintah dalam memberdayakan perempuan. Sebagai bukti bahwa dalam menuntaskan isu-isu gender bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi juga melibatkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pencegahan, dan penangan permasalah-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Adapun Unsur-unsur yang terlibat berasal dari berbagai lapisan masyarakat, diantaranya keluarga, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pengacara, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesehatan, psikiater, atau anggota satgas lain terkait perempuan dan anak yang telah dibentuk di daerah.

F. Sistematika Pembahasan

BAB (I). PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berkaitan dengan topik atau tema permasalahan

BAB (II). KAJIAN TEORITIK yang memuat mengenai penelitian terdahulu, dan kerangka teoritik yang relevan dengan tema dan kerangka analisis.

BAB (III). METODE PENELITIAN Berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam proses penelitian. Pemilihan metode penelitian harus sesuai dengan tema, sehingga permasalahan yang diteliti dapat terjawab dan terbukti keabsahannya, serta penentuan lokasi penelitian. Jenis penelitian berupa data yang terbentuk dari: pemikiran, pengalaman dan pengetahuan narasumber sesuai indikator pertanyaan, selanjutnya sumber data berupa informan yang akan diwawancarai dan berupa dokumen yang berkaitan dengan tema, serta metode pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data.

BAB (IV). HASIL DAN PEMBAHASAN memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian dan hasil analisis dari penelitian lapangan.

BAB (V). PENUTUP memuat kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai data pendukung, dibutuhkan sebuah hasil observasi yang pernah dilaksanakan. Pemaparan hasil observasi ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang relevan dengan objek yang akan diteliti, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik kekurangan ataupun kelebihan. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari buku, skripsi, maupun jurnal-jurnal dalam rangka mendapatkan informasi yang ada sebelumnya. Berikut daftar kajian penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1

Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Keterangan Penelitian	Hasil Penelitian dan Perbedaan
1.	Muhammad Nur Taufiq, Skripsi Mahasiswa Sosiologi Universitas Negeri Surabaya tahun 2017 yang berjudul **"PEMBANGUNAN BERBASIS GENDER MAINSTREAMING (Studi Analisis Gender Implementasi Program Gender Watch Di Gresik)".**	Program *Gender Watch* merupakan sebuah program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) yang terdiri dari empat desa di Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Pada pelaksanaannya KPS2K menggelar sekolah Perempuan. *Output* dari program ini yaitu terdapat beberapa perubahan bagi perempuan yang termaginalkan. Mereka mulai terlibat langsung diranah publik, seperti menjadi peserta dalam kegiatan pemerintah musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Hal ini dikarenakan pada musrenbang sebelum-sebelumnya. Partisipasi perempuan tidak diperhitungkan. Tak hanya itu, KPS2K juga bermitra dengan pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah dalam menjalankan program kerja. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu: Jika penelitian sebelumnya fokus penelitiannya terhadap strategi KPS2K dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk memberdayakan perempuan melalui gerakan di ranah pendidikan penyadaran gender yaitu *Gender Watch*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Maka fokus penelitian yang akan dilaksanakan lebih difokuskan pada sejauh mana implementasi strategi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bojonegoro dan sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan program pemberdayaan perempuan dan anak melalui satuan tugas perlindungan perempuan dan anak
2.	Jurnal yang ditulis oleh Dian Martiany, yang berjudul "**Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah)"**, Aspirasi: Volume 2 Nomor 2, 2011.	Tulisan ini mengkaji terkait tingkat keberhasilan pengimplementasian kebijakan dan tantangan pelaksanaan Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang pengarusutamaan gender di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Yang bertujuan agar pelaksanaan pengarusutamaan gender dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dan tepat sasaran dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG). Terdapat persamaan aspek penelitian yaitu yang berkaitan Implementasi PUG sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender. Perbedaannya, terletak pada metode penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan *library research*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif, serta memakai teknik pengumpulan data *library research*, dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi.
3.	Skripsi yang ditulis oleh Anjas Asmara Mahasiswa Universitas Lampung tahun 2016 yang berjudul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MP) Studi Pada Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013".**	Fokus dalam penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan menggunakan 6 indikator, diantaranya:ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi dan lingkungan(ekonomi, sosial, politik). Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dengan hasil analisis yaitu Kegiatan pengarusutamaan gender dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara telah dilaksanakan dengan baik. Sumber Daya Fasilitator dan kader yang memahami konsep gender menghasilkan komunikasi yang baik. Maka fokus penelitian yang akan dilakukan yaitu terhadap perilaku birokrasi berdasarkan tiga faktor konsep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		implementasi kebijakan Edward III, yaitu: Komunikasi, Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, dan Struktur birokrasi.
4.	Skripsi Oleh Siti Nur Hasanah, Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2019 yang berjudul **" Evaluasi Anggaran Responsif Gender (Studi Kasus Program Strengthening Publik Services Through The Empowerment Of Women-Led Advocacy And Social Audit Networks dalam Mengadvokasi Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro oleh LSM Bojonegoro)**	Hasil temuan penelitian ini membahas terkait evaluasi anggaran responsif gender melalui LSM BI dalam program kerja SPEAK yang bertujuan agar meningkatnya kapasitas perempuan dalam ranah publik serta dalam pengambilan keputusan agar mengurangi kesenjangan gender dan lebih responsif gender. Jika penelitian sebelumnya lebih fokus dalam program kerja LSM dalam upaya mengurangi kesenjangan gender di sektor pendidikan dan kesehatan, maka penelitian yang akan dilaksanakan lebih fokus terhadap upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender.
5.	Jurnal oleh Mohamad Rizky Sultan yang berjudul "Inovasi Penguatan Peran Satuan Tugas Penanganan Perempuan dan Korban Kekerasan di Kabupaten Sigi dan Donggala dalam Upaan Perlindungan Perempuan dan Anak. (Jurnal:Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, 25-26 Nopember 2020)	Hasil temuan penelitian ini membahas tentang Penguatan peran Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sigi dan Donggala dalam upaya perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan dan pelatihan dasar kepada satgas PPA desa baik pengetahuan dasar gender hingga pelatihan kapasitas penanganan terhadap penyintas kekerasan perempuan dan anak di masa pandemi covid-19. Jika penelitian sebelumnya lebih focus pada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran dan fungsi Satgas PPA, maka Penelitian yang akan dilakukan yaitu pemanfaatan organisasi sebagai wadah pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan.
6.	Jurnal oleh Ana Sabhana Azmy, Fini Pertiwi yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dibidang Pendidikan Di Kota Bogor."** (Jurnal Perempuan,Agama dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan walikota Bogor No.42 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG pada pendidikan menengah di kota Bogor belum maksimal. Pola komunikasi, sumber daya dan disposisi atau sikap aparat belum maksimal dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan masalah pemahaman yang bias gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Jender, Vol.19. No.2,2020)	Perbedaannya: Penelitian yang akan dilakukan yaitu mengacu pada satuan tugas perlindungan perempuan dan anak melalui kacamata konsep pengarusutamaan gender (PUG) sebagai salah satu strategi pembangunan.
7.	Indra Kertati, "**Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Semarang.**" (Jurnal Riptek Vol.13 No.1,2019)	Hasil temuan jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan capaian apa yang telah ditetapkan dalam indikator Evaluasi Pelaksanaan PUG sebagaimana Kemen PPPA No.17 Tahun 2018. Terdapat persamaan aspek penelitian yang berkaitan dengan implementasi pengarusutamaan gender. Perbedaannya terletak pada fokus sasaran penelitian jika penelitian ini mengkaji seluruh aspek pelaksanaan PUG di Kota Semarang, Maka penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui pengarusutamaan gender di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang kemudian menjadi gambaran latar belakang terbentuknya satuan tugas perlindungan perempuan dan anak.

Berbagai pemaparan temuan diatas yang membahas terkait isu gender, setiap pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan di masing-masing daerah. Dalam penerapan kebijakan. namun, realitanya praktik di lapangan belum sepenuhnya optimal. Mulai dari Implementatornya yang masih belum maksimal dalam bekerja, hingga belum ada regulasi terkait perda pengarusutamaan gender. Hal inilah yang mengakibatkan kesetaraan gender di Indonesia masih ada kesenjangan. Meski demikian, dari pemaparan observasi pemerintah daerah telah berusaha menerapkan 7 prasyarat PUG.

B. Kajian Teoritik

1. Pengarusutamaan Gender

Pada tahun 1968 pertama kali muncul istilah gender atau dalam Bahasa Indonesia yang artinya Jenis kelamin, diperkenalkan oleh seorang profesor dari Universitas of California, Los Angeles Amerika Serikat yaitu Robbert Stoller .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ann Oakley (2008:3).[14]: gender merupakan sebuah konstruksi sosial yang bisa disebut dengan atribut yang dipakai oleh manusia yang dibangun berdasarkan kebudayaan manusia. Sebagian besar orang awam mendefinisikan gender sama dengan seks. Padahal sebenarnya gender dan seks memiliki arti yang berlawanan. Jika seks itu merupakan jenis kelamin yang bersifat biologis pemberian Tuhan sejak manusia masih dalam kandungan. Sedangkan, gender merupakan perbedaan peran, tanggung jawab, hak hingga kewajiban berdasarkan kesepakatan kehidupan masyarakat.[15]

Proses terjadinya perbedaan gender sebenarnya karena perbedaan tersebut tanpa disadari dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan sampai dikonstruksikan secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Akibatnya, timbul pemikiran-pemikiran bahwa gender merupakan sifat biologis yang berasal dari ketetapan dari Tuhan yang tidak bisa dirubah lagi. Dengan perspektif demikian,perbedaan gender yang melekat pada pikiran masyarakat diartikan sebagai fitrah laki-laki dan perempuan. Justru, berbagai kajian yang menganalisis gender menemukan berbagai penyimpangan.[16] Salah satunya, pandangan bahwa kaum perempuan itu lemah lembut, emosional, irasional, sehingga perempuan tidak mampu dijadikan seorang pemimpin. Sehingga perempuan mendapatkan posisi yang tidak strategis dalam proses pengambilan keputusan. Seiring perkembangan zaman, muncul gerakan-gerakan baru oleh negara-negara demokratis dengan membentuk lembaga pemerintah khusus perempuan, serta maraknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyuarakan hak-hak perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan.[17] Pada kondisi seperti ini menuntut adanya aksi nyata dari aktor politik agar tercipta kesetaraan dan keadilan gender guna mewujudkan tujuan pembangunan. Salah satu aksi pemerintah RI dalam mewujudkan kesetaraan gender yaitu adanya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

---

[14] Wewen Kusumi Rahayu, 2016. *Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)*. (Jurnal:Analisis dan Pelayanan Publik Vol 2, No.1) hal. 95

[15] Ni Made Wiasti, *Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)*, (Jurnal: Sunari Penjor Volume 1, No.1, 2017) hal. 32

[16] Mujahidah, *Dinamika Gender dan Peran Perempuan dalam ekonomi Keluarga*,(Jurnal:Al-ulum, Vol,10 No.1,2010)hal.7

[17] Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996) hal. 99-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengarusutamaan Gender merupakan sebuah strategi untuk meningkatkan peran, kedudukan, kualitas hidup perempuan dan upaya-upaya agar terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender diseluruh sektor kehidupan sosial dan negara. PUG atau *Gender Mainstreaming* merupakan hasil dari perdebatan oleh para ahli terutama oleh *Commission on the status of Women* (CSW) yang membuahkan hasil. Kemudian konsep *gender mainstreaming* pertama kali pada tahun 1985 di deklarasikan oleh Konferensi Perempuan Dunia yang ke-3 di Kenya Afrika yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Dengan tujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang berkaitan dengan perempuan ke dalam pembangunan negara. Kemudian diperkuat lagi pada tahun 1995 dengan mengadakan konferensi keempat di Kota Beijing, China dengan dalih *gender mainstreaming* sangat penting diterapkan di seluruh negara agar perempuan tidak termarjinalisasi. Langkah awal yang dilakukan setiap negara harus ada *Gender watch* yang berfungsi dalam menjalankan proses monitoring dan evaluasi program dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan yang responsif gender. *Gender watch* sendiri terdiri dari 3(tiga) pihak yang terlibat yaitu Pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi, Pemerintah Desa/kelurahan, serta melibatkan masyarakat sipil *(civil society)*.[18]

Kemenpppa dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP3A) pada tingkat daerah mempunyai tugas dalam menerapkan pengarusutamaan gender. Namun, dengan adanya instansi pemerintah yang akan menjadi wadah bagi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, terkadang belum menjadi jaminan terealisasinya kesetaraan gender dan keadilan gender dalam menentukan suatu kebijakan. maka dari itu, perlu adanya tindakan-tindakan yang menerapkan pengarusutamaan gender dalam menentukan kebijakan pada otonomi daerah. Berikut, tahap-tahap untuk menerapkan PUG:

1) Perencanaan, Pembuatan dan Pelaksanaan

   Untuk menerapkan PUG tahap awal yang harus dilakukan yaitu tahap perencanaan, yang dimana dibutuhkan data-data statistic seperti: pendapatan per-kapita, sumbangan dalam pendapatan pekerjaan, umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, keterlibatan perempuan di

[18] Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik:Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008)hal. 141-142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

parlemen. Data ini berfungsi sebagai landasan awal dalam proses identifikasi dan analisis kesenjangan gender gender. Setelah mengetahui alasan terjadinya kesenjangan gender, kemudian dirumuskan kebijakan lagi yang lebih sensitif pada kebutuhan perempuan. Langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan kebijakan,biasanya pada pelaksanaan kebijakan ini dibarengi dengan rencana program kerja yang responsif gender untuk meminimalisir kesenjangan gender. Data-data tersebut menjadi input yang paling utama dalam tahap perumusan kebijakan.

2) Penerapan

Langkah selanjutnya yaitu penerapan program kerja yang responsif gender. Pada tahap ini, setiap daerah memiliki isu-isu gender yang berbeda-beda, sehingga penerapan program kerja setiap daerah berbeda. Bukan hanya implementor yang berperan dalam kegiatan ini, masyarakat juga harus dilibatkan, serta adanya jalur koordinasi antara *stakeholder* di setiap tingkatan.

3) Partisipasi

Pada tahapan ini lebih mengacu pada sasaran kebijakan. Seperti siapa yang berpartisipasi, siapa yang menjadi target sasaran dan siapa yang mendapatkan manfaatnya.

4) Manajemen

Setelah mengetahui target sasaran, selanjutnya tahap manajemen. Pada tahap ini partisipan berperan mulai dari proses perencanaan program, pengorganisasian dan pengawasan.

5) Pengawasan dan Evaluasi

Tahapan yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi. Pada tahapan ini, pihak yang mengawasi dan mengevaluasi harus membuat sebuah analisa terkait kebijakan, mulai dari penyusunan indikator *input-output* seperti data-data tentang progress hasil kebijakan,dan indikator pengaruh (sebab akibat) yang dipetakan menurut jenis kelamin. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak kebijakan tersebut, dan apakah sudah responsif gender atau belum.[19]

Adapun 7 (Tujuh) Prasyarat Pengarusutamaan Gender, diantaranya:

[19] Jumiati, *Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkakng Kota Sawahlunto,* (Jurnal:Tingkap, Volume X nomor 2, 2014)hal.146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Komitmen: Perjanjian (keterikatan) untuk melakukan suatu tindakan.[20] Komitmen masuk ke dalam kategori prasyarat PUG karena pentingnya Komitmen politik dan kepemimpinan lembaga untuk menuangkan PUG ke dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Dalam hal ini, Komitmen pemerintah bisa berupa aturan tertulis yang memiliki sifat mengatur (*regelling*) dan mengikat. Contohnya memasukan indikator PUG kedalam rencana strategi (renstra).[21]
2) Kebijakan: Terdapat kerangka kebijakan yang merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan responsif gender pada pembangunan daerah maupun negara yang tertuang dalam bentuk kebijakan, surat keputusan, strategi program, buku pedoman, Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai bentuk operasional dari peraturan daerah maupun peraturan negara..[22]
3) Kelembagaan: Terdapat struktur dan mekanisme pemerintah daerah maupun stakeholder pada pelaksanaan PUG, seperti: Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, *Focal Point Gender*, forum dan tim pelaksana.[23]
4) Sumberdaya: Sumber daya pada prasyarat PUG yaitu sumber daya manusia yang memiliki potensi, kemampuan, kualitas, dan kepekaan terhadap gender dan sumber dana yang berupa anggaran yang memadai untuk kebutuhan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anggaran responsif gender yang tercantum dalam APBN maupun APBD.
5) Data Terpilah Gender: Data terpilah gender ini berupa data-data dan informasi yang terpilih berdasarkan jenis kelamin. Data terpilah gender ini berfungsi untuk memudahkan dalam pemetaan gender sebagai dasar penyusunan kebijakan.
6) Alat Analisis: Mempunyai alat analisis yang berguna untuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.[24]

---

[20] Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Pusat Bahasa,2008) hal. 743
[21] Indra kertanti, 2019. *Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Semarang*, (Jurnal: RIPTEK Vol 13 no.1)hal.60
[22] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2016. *Road Map: Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)*
[23] Indra Kertanti, Ibid,. hal.60
[24] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Partisipasi: Dalam negara demokrasi partisipasi selalu dikaitkan dalam seluruh produk kebijakan. Hal ini dikarenakan tanpa partisipasi dari masyarakat, negara akan menjadi negara otoriter. Maka dari itu, peran masyarakat sipil dalam berkomitmen dalam menuntaskan isu-isu gender sangat penting dalam kategori prasyarat PUG.

2. Kebijakan Publik

A. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan erat kaitannya dengan perundang-undangan mulai dari aspirasi,rancangan, hingga program kerja, keputusan, dan tujuan negara. Istilah kebijakan sebenarnya lebih mengacu pada pedoman atau panduan dalam mengambil suatu tindakan yang bersifat universal sampai tindakan yang bersifat spesifik. Adapun beberapa pendapat menurut para ahli tentang kebijakan di antaranya

1. Anderson (1998)[25]

   Kebijakan merupakan suatu tindakan yang memiliki sebuah tujuan disertai dengan tindakan oleh seseorang maupun kelompok untuk mencari solusi sebuah permasalahan.

2. Fredrick (1998)[26]

   Menyebutkan bahwa seseorang, kelompok,pemerintah yang saling terikat memberikan rekomendasi dengan menjabarkan peluang dan tantangan guna mencapai suatu pelaksanaan atau tujuan.

3. Aminullah (2001)[27]

   Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang strategis guna mempengaruhi sebuah pencapaian dalam jangka waktu panjang dan terakomodir.

4. David Eston

   Kebijakan merupakan sebuah konsep yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh pusat kajian ilmu kebijakan yang berguna untuk membantu masyarakat dalam melakukan proses identifikasi masalah.[28]

---

[25] Sholih Muadi, *Konsep Teori Perumusan Kebijakan Publik*, (Jurnal Review Politik, Volume 6, Nomor 2, 2016) hal.197

[26] Ibid, 198

[27] Taufiqurokhman,2014. *Kebijakan Publik:Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintah* (Jakarta:Universitas Moestopo Beragama Pers) hal.7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Muchsin & Fadillah Putra (2002)

   Kebijakan dan hukum merupakan satu kesatuan yang terikat yang tidak bisa terpisahkan. Di dalam proses perancangannya semua produk hukum adalah hasil dari formulasi kebijakan publik oleh aktor politik yang disahkan menjadi undang-undang sehingga memiliki legalitas hukum. Begitupun sebaliknya, seluruh produk hasil dari kebijakan publik disahkan dalam bentuk produk hukum sebagai tanda legalitas dari keputusan politik.[29]

6. Raymond A. Bauer dalam *The Study of Policy Formation* (1968).

   Rumusan Kebijakan adalah sebuah aktivitas sosial oleh seseorang, kelompok, pemerintah yang menghimpun berbagai proses intelektual, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika proses intelektual tersebut dapat ditingkatkan.[30]

7. Effendi dalam Syafiie (200:106)[31]

   Kebijakan publik merupakan sebuah pengetahuan tentang sebab-akibat, resiko, kinerja dan program untuk publik. Dalam hal ini pengetahuan yang dimaksud yaitu sebuah proses yang menyajikan data-data dan informasi untuk aktor politik, lembaga peradilan, serta publik dengan tujuan agar perumusan kebijakan lebih bermanfaat.

Berdasarkan beberapa definisi kebijakan publik menurut para ahli, dapat di tarik kesimpulan bahwasannya kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan terstruktur yang dilakukan oleh para aktor politik, kelompok, maupun masyarakat untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di lingkup masing-masing. Dengan tujuan terwujudnya kemaslahatan bersama. Tujuan tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya pelaksanaan dari kebijakan publik itu sendiri. Pelaksanaan kebijakan publik adalah sebuah program atau kegiatan setelah disahkannya kebijakan dalam bentuk legalitas hukum. Secara garis besarnya pelaksanaan kebijakan seperti yang dijelaskan

---

[28] Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung:Pustaka Setia, 2018) hal.35

[29] Awan Y. Abdoellah, Yudi Rusfiana, *Teori & Analisis kebijakan Publik,* (Bandung: Alfabeta, 2016) hal. 33

[30] Agus Subianto, *Kebijakan Publik:Tinjauan Perencanaan,Implementasi dan Evaluasi* (Surabaya:Brilliant,2020) hal. 1

[31] Zahrotun Nuraini,Skripsi. *Implementasi Kebijakan Mendirikan Bangunan* (Malang:Universitas Brawijaya,2017) hal.16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Jann & Wegrich (2007) yaitu: Perincian program yang lebih spesifik, Alokasi sumber daya, dan Keputusan. Pada prosesnya, pelaksanaan kebijakan publik tentu saja melibatkan seluruh sektor, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Karena sektor-sektor tersebut sangat berpengaruh pada perilaku pada seluruh pihak terutama pihak terkait *(stakeholder)*.[32]

B. Implementasi Kebijakan

Sekitar tiga dekade belakangan ini, Implementasi Kebijakan menjadi primadona bagi para ilmuwan sosial di segala penjuru dunia, terutama di pusat kajian administrasi negara dan ilmu politik. Menariknya, Problematika terkait implementasi kebijakan sangat kompleks. Mulai dari pengaruh faktor yang sangat sederhana hingga faktor yang sulit terpecahkan. Jika Kebijakan sudah dirumuskan oleh aktor politik tetapi tidak dijalankan, maka kebijakan tersebut tidak akan terwujud. Dalam proses perencanaan kebijakan membutuhkan sebuah usaha yang keras untuk memecahkan masalah. Maka dalam hal ini peran dan kedudukan aktor politik menjadi sangat strategis.[33] Menurut Van Meter dan Van Horn (Grindle,1980:6) implementasi memiliki tugas untuk membangun jaringan *(networking)* melalui aktivitas lembaga pemerintahan dan para pemangku kepentingan yang kemungkinan besar tujuan *(goals)* dari kebijakan itu dapat direalisasikan. Sepemikiran dengan Van Meter dan Van Horn, Edward III (1984:9-10) juga mengenalkan pada dunia tentang pendekatan-pendekatan masalah implementasi kebijakan dengan menggunakan variabel-variabel faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat suatu keberhasilan pada implementasi kebijakan. Menurut George C Edward III ada 4 (empat) variabel untuk mengidentifikasi pada saat perencanaan kebijakan hingga sumber masalah yang terjadi. Antara lain[34]:

1) Komunikasi *(Communication)*

[32] Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, (Jurnal: Publik, Vol.11 No.01,2017)hal. 4

[33] Budi,.Ibid,.Hal 16

[34] Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*, (Jurnal:Administrasi Publik, Vol.1 No,1, 2010) hal. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komunikasi ini merupakan modal awal dalam sebuah pengimplementasian. Yang dimana memiliki peran sebagai media penyampaian pesan antara implementor (pelaksana program) dan pembuat kebijakan *(Policy maker)*. Idealnya, arah komunikasi dalam implementasi kebijakan tidak hanya dari atas ke bawah *(Top down)* saja, tetapi bisa juga dari arah bawah ke atas *(bottom up)*. Jika keduanya sama-sama memberikan kejelasan, keterbukaan informasi, maka tujuan *(goals)* dari implementasi itu sendiri akan mudah tercapai. Artinya, agar dapat terwujudnya implementasi yang efektif, implementor dan pembuat kebijakan harus memahami betul apa yang menjadi tujuan yang ingin diwujudkan dalam pengimplementasian dan tepat sasaran. Yang terpenting dalam melaksanakan komunikasi kebijakan harus transmisi, konsisten, dan kejelasan. Aturan-aturan dalam implementasi kebijakan harus disampaikan secara konsisten, jelas, kredibel dan terperinci kepada para pelaksana yang memiliki kualitas dan elektabilitas yang baik. Jika tidak, bisa terjadi miss-komunikasi antara keduanya dan hasil dari implementasi tidak maksimal.

Adapun beberapa faktor penyebab dalam penyaluran komunikasi menurut Winarno (2002:17):

a. Terdapat perbedaan pendapat yang saling menyimpang antara implementor dan pembuat kebijakan. Peristiwa ini dapat mengakibatkan distorsi pada komunikasi kebijakan.
b. Terdapat hierarki yang berlapis-lapis di dalam struktur birokrasi, serta memiliki struktur yang sangat ketat. Sehingga sangat berpengaruh pada efektivitas komunikasi yang sedang dijalankan.
c. Penerima komunikasi bisa jadi dihambat oleh anggapan yang selektif dan tidak ada niatan maupun kemauan dari implementor untuk mengetahui syarat-syarat suatu kebijakan.

Yang paling utama dalam implementasi kebijakan sebenarnya terletak pada bagaimana komitmen dan konsistensi aktor politik. [35]

2) Sumber Daya *(Resource)*

[35] Dwi Nurani, Thesis. *Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Jakarta Selatan*.(Jakarta: Universitas Indonesia,2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah adanya komunikasi antara implementor dan pembuat kebijakan. Sumber daya merupakan hal yang tak kalah penting juga perannya dalam pengimplementasian kebijakan. Adapun sumber daya meliputi: staff yang berkompeten dalam menjalankan tugasnya, perintah, dan saran dari berbagai pihak. Selain itu, harus ada keseimbangan antara keahlian yang harus dimiliki dan jumlah staff yang dibutuhkan.[36]

3) Sikap Birokrasi atau Pelaksana *(Dispositions)*

Sikap birokrasi merupakan karakteristik dan watak yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan yaitu: Disiplin, kejujuran, komitmen, kecerdasan, adil,dan demokratis. Berhasil atau tidaknya tujuan dari kebijakan tergantung pada implementor.

4) Struktur Organisasi *(Bureaucratic Structure)*

Para pelaksana kebijakan memiliki otoritas dalam menjalankan tugas dan wewenang. Adapun tugas dan wewenang ini saling terikat dengan struktur birokrasi pada posisi kelembagaan atau individu sebagai aktor pelaksana kebijakan. Pada umumnya, birokrasi memiliki acuan standar dalam bekerja, hal ini biasanya tertuang dalam Prosedur kerja atau biasa dikenal dengan Standard Operating Procedures (SOP).[37]

C. Dimensi Implementasi Kebijakan

Untuk menunjang keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik, dapat diukur dengan menggunakan prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya:

1. Partisipasi *(Participation)* : seluruh masyarakat mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya hak suara tidak langsung ini dapat melalui lembaga yang mempunyai wewenang dalam mewakili kepentingan masyarakat.[38] Dalam hal ini, sikap partisipatif masyarakat sangat berpengaruh dalam proses evaluasi kebijakan. Dalam artian, proses evaluasi ini dapat

[36] Zahrotun Nuraini,.Op,.Cit,.hal.21
[37] Abdullah ramdhani,Ibid., hal.5
[38] Muhammad Ilham Arisaputra, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia*,(Jurnal:Yuridikam Vol.28 No.2, 2013) hal. 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengontrol kinerja para pelaksana dan dapat meminimalisir penyalahgunaan jabatan.

2. Aturan Hukum *(Rule of Law)* : Produk hukum yang dibuat harus bersifat adil tanpa mendiskriminasi pihak manapun.
3. Konsistensi[39]: Proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan jika para pelaksana menjalankan tugas secara konsisten dan berpegang teguh pada SOP maupun peraturan yang berlaku.
4. Transparansi *(Transparancy)*: adanya keterbukaan, kebebasan arus informasi yang keluar maupun informasi yang masuk. Informasi ini bisa berupa data-data yang dibutuhkan publik,serta dapat dipahami oleh masyarakat luas agar bisa di monitoring.[40]
5. Akuntabel *(Accountability):* seluruh aktivitas pada pelaksanaan kebijakan, harus bisa dipertanggungjawabkan dari segi administratif maupun dari segi substansif. Artinya, para aktor politik, pelaksana kebijakan, sektor swasta dan masyarakat yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan harus bertanggung jawab kepada publik atas segala tindakan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
6. Efektifitas dan efisiensi: tingkat efektivitas dapat diukur dari pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Efektivitas ini memiliki hubungan dengan efisiensi, yang dimana penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sebuah tujuan bisa diukur dengan berdasarkan penggunaan waktu, biaya, personel, peralatan dan sumber daya lainnya.[41]

[39] Abdullah Ramdhani, Ibid., hal.7
[40] Muhammad Ilham Arisaputra,Ibid.,hal.198
[41] Abdullah Ramdhani,Ibid., hal.7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kerangka Analisis

Gambar 2.1 Kerangka Analisis

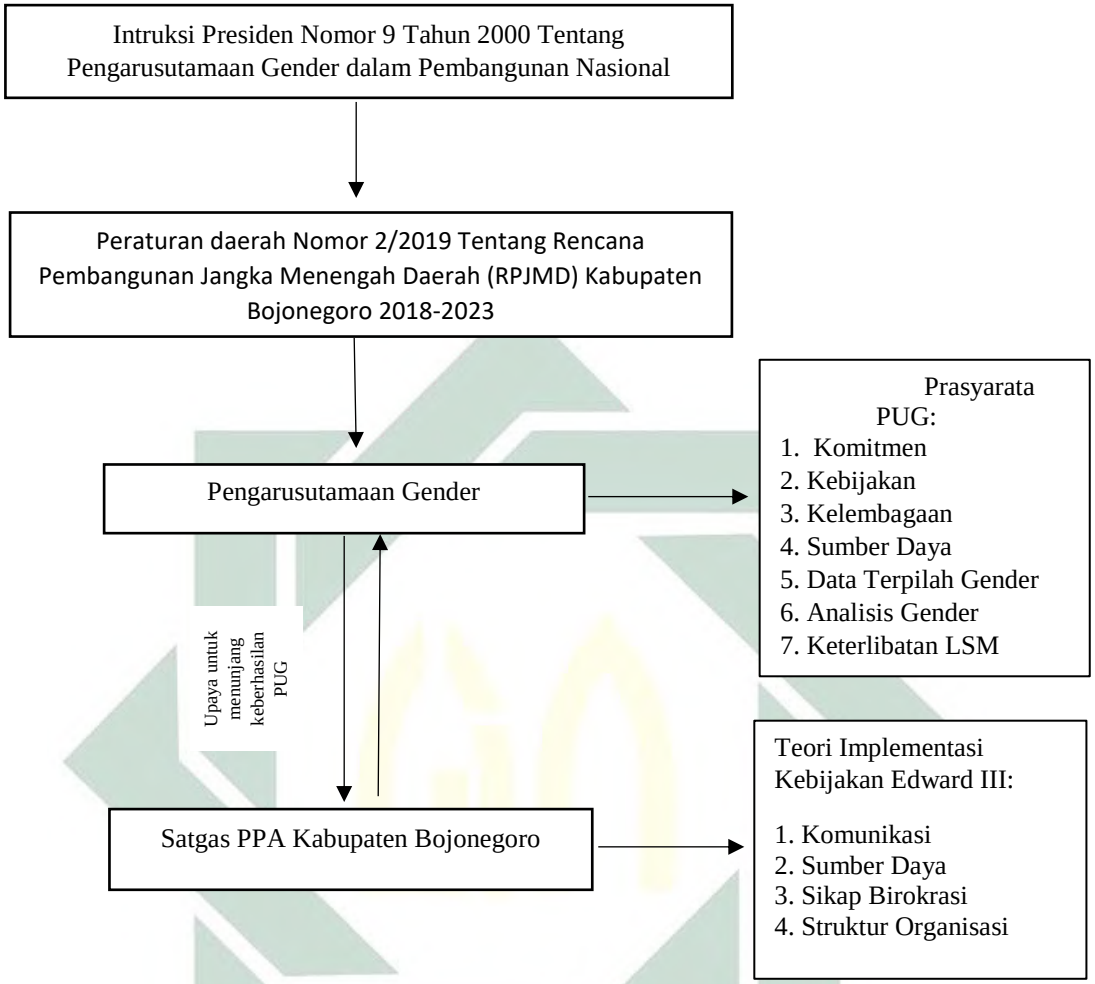

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperdalam dan memahami sebuah fenomena utama. Agar dapat memahami fenomena tersebut, maka peneliti melakukan wawancara kepada orang-orang yang berkaitan dengan fenomena tersebut dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat universal dan mendalam. Metode penelitian ini juga disebut dengan penelitian lapangan *(field research)*. Hal ini dikarenakan peneliti harus terjun ke lapangan agar terlibat langsung dengan partisipan.[42] Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini diantaranya: pengumpulan informasi yang telah disampaikan oleh partisipan atau informan berupa teks maupun kata-kata, kemudian peneliti melakukan analisis data dan selanjutnya peneliti memaparkan data secara deskriptif berdasarkan perilaku orang-orang yang sedang diamati.[43] hal ini dikarenakan tujuan dari penelitian kualitatif sendiri untuk mendapatkan asumsi dari beberapa sumber informan dilihat dari sudut pandang masing-masing. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dengan mengambil keuntungan dari pendekatan kualitatif yaitu mengkombinasikan data-data dan teori guna mempertajam analisis dan pokok pembahasan.[44]

B. Subyek Dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan subyek penelitian kualitatif, orang yang memberikan informasi disebut sebagai informan atau narasumber. Penelitian ini memakai teknik penentuan informan berdasarkan kriteria khusus dengan pertimbangan bahwa informan mengetahui seluk beluk terkait objek yang diteliti. Teknik tersebut dikenal dengan istilah teknik *purposive sampling*. Berikut terdapat beberapa informan dari lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan relawan satgas PPA.

1. Informasi terkait 7 Prasyarat pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro

---

[42] Conny R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,2010) hal.9

[43] S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm.36

[44] Safira Herawati, Skripsi. *Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gresik:Studi Kasus Musyawarah Rencana Pembangunan Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2019*,(Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2020) hal. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan daerah) dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya:
   1) Mempunyai fungsi untuk menyusun kebijakan teknis dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
   2) Mempunyai wewenang selaku ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dalam memfasilitasi OPD di bidang pengarusutamaan Gender.
   3) Memiliki fungsi untuk mengkoordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek seluruh OPD
   4) Memiliki wewenang dalam pelaporan, pertanggung jawaban program di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.
b. LSM BI (Lembaga Swadaya Masyarakat)
   1) Memiliki fungsi sebagai wakil masyarakat dalam mengawal,mengawasi, mengkritisi produk hukum berupa kebijakan terhadap permasalahan-permasalahan atau penyimpangan yang terjadi di kabupaten bojonegoro.
   2) Memiliki program kerja bernama SPEAK *(Strengthening Publik services through the Empowerment of women-led Advocacy and social audit networKs)* sebagai upaya untuk mendorong kelompok perempuan lebih proaktif terhadap isu gender.
   3) Bermitra dengan aktor politik, pemangku kepentingan dalam mengawal proses pembangunan yang responsif gender.

2. Informasi terkait Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
   A. DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya:
      1) Bermitra dengan seluruh OPD dalam Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender untuk merumuskan dan melaksanakan program kerja di sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat.
      2) Memiliki wewenang dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan tentang kualitas hidup perempuan dan anak.
      3) Memiliki Otoritas dalam melaporkan pelaksanaan program kerja pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Memiliki tugas untuk memberdayakan perempuan guna meningkatkan Indeks Pembangunan Gender.

B. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA)

1) Bermitra dengan OPD DP3AKB dalam melaksanakan program kerja di bidang pemberdayaan dan perlindungan anak
2) Membantu Organisasi Layanan perempuan dan anak untuk menangani masalah perempuan dan anak diaerah melalui kegiatan preventif maupun kuratif.

Sedangkan Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bojonegoro dengan beberapa pertimbangan diantaranya:

1. Jumlah penduduk berdasarkan data BPS Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 yaitu 1.344.038 jiwa. berdasarkan data tersebut, penduduk laki-laki berjumlah 676.083 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 667.955 jiwa. Dari segi pemberdayaan perempuan, kabupaten bojonegoro terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2019 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencapai angka 55,44 dan tahun 2020 diproyeksikan mencapai angka 56,11. Meskipun angka partisipasi perempuan di parlemen masih terbilang rendah hanya mencapai angka 10% di tahun 2020. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk berkomitmen dalam pembangunan yang inklusif dengan meningkatkan partisipasi dan keterlibatan kelompok perempuan dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender diawali adanya komitmen politik dan kepemimpinan oleh lembaga pemerintah melalui kebijakan, program dan kegiatan dengan disertainya kebutuhan anggaran. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2017, anggaran yang diperuntukkan program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 67.054.400 dari total Anggaran DP3AKB sebesar Rp. 5.961.913.678 atau sekitar 1,12%. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa komitmen pemerintah kabupaten bojonegoro dari segi pengutamaan pengarusutamaan gender masih minim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, ada beberapa teknik yang diterapkan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Wawancara

Metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan menggunakan teknik *In-depth Interview* (Wawancara mendalam) sebagai teknik pengambilan data. Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.[45] Penggunaan teknik ini sangat berguna untuk mendapatkan jawaban dari narasumber yang lebih rinci terkait topik penelitian. Serta dapat digunakan untuk menjaring data-data primer yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Wawancara ini lakukan terhadap lembaga terkait. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

a. Maspriyadi,SE : Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan (BAPPEDA)
b. Zunaedi,SH : Sub Bidang Pengendalian dan, Evaluasi dan Pelaporan (BAPPEDA)
c. Fiyanti Soeci Hidayati : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB)
d. Lilis Aprilliati : Budget Advocacy Officer, Lembaga Swadaya Masyarakat Bojonegoro Institute
e. Ummi Hanik : Koordinator Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan anak

2. Observasi atau Pengamatan

Peneliti mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan pengamatan terhadap informan melalui tindakan atau aktivitasnya,

3. Studi Kepustakaan *(Library Research)*

Peneliti memanfaatkan fasilitas berupa buku, website jurnal, dan dokumen-dokumen terkait dengan cara mempelajari, menganalisis dan mengolah data

4. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini menggunakan sumber data dari berbagai macam dokumen berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender

[45] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010) hal. 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(PUG) di Kabupaten Bojonegoro dalam Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Studi pada Satuan Tugas perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020)yang diperoleh secara langsung dari beberapa narasumber dan yang diperoleh secara online dari website resmi maupun sumber internet lainnya , seperti: data-data buku profil gender, File Pembangunan Manusia berbasis gender, RPJMD, APBD, dan renstra dari dinas terkait.

D. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang didapatkan, peneliti menggunakan teknik analisis model interaktif (Miles dan Huberman, 1992:20) dengan beberapa tahap, diantaranya:

1. Pengumpulan data *(Data collection)*

   Setelah data yang didapatkan dirasa lengkap, peneliti mengumpulkan semua data baik berupa catatan lapang, dokumen-dokumen berupa *soft file* dan *hard file*, foto kegiatan, serta rekaman audio. Rekaman audio pada saat wawancara tersebut kemudian di transkrip. Kegiatan transkrip ini sangat berguna bagi peneliti untuk memetakan hasil wawancara berdasarkan indikator-indikatornya.

2. Reduksi Data *(Data Reduction)*

   Reduksi data ini sangat penting dalam menganalisis data. Yang dimaksud dengan reduksi data adalah memilih data berdasarkan pengkategorian atau biasa dikenal dengan pengkodingan. Peneliti melakukan reduksi data dari data yang masih global untuk di pusatkan pada hal-hal yang sifatnya relevan dengan pokok pembahasan penelitian. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan dalam mereduksi data: menyaring data dengan teliti secara ringkas, serta memperhatikan dan mempertimbangkan informasi berdasarkan tingkat kepentingan data. Setelah itu dikategorikan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

3. Paparan data *(Data Display)*

   Setelah proses reduksi data selesai, tahapan selanjutnya yaitu paparan data. Yang dimana peneliti menginterpretasikan hasil wawancara. Interpretasi merupakan sebuah penafsiran peneliti terhadap informasi yang telah disampaikan oleh informan. Interpretasi ini bertujuan agar hasil penelitian lebih naratif dan peneliti bisa memahami peristiwa yang terjadi dan dapat kembali ke lapangan jika data yang dapat dirasa kurang.

4. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan *(Verification)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah tiga tahapan tersebut sudah terselesaikan. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan cara menggabungkan beberapa teks wawancara yang sudah diinterpretasikan berdasarkan indikator yang sama. Dengan begitu, peneliti menemukan persamaan dan perbandingan dari beberapa informan. Sehingga hasil penelitian bisa dikatakan shahih.[46]

Gambar 3..1 Model Analisis Data Miles dan Huberman

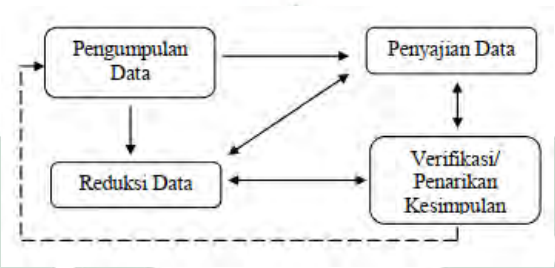

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam pelaksanaannya, teknik pemeriksaan keabsahan data yang penting untuk dilakukan dalam menguji kevaliditasan,keteralihan *(transferability)*, kebergantungan *(dependability)*, dan kepastian *(confirmability)*.[47] Untuk memberikan hasil yang valid, peneliti menganalisis bukti dengan mengacu beberapa metode, diantaranya:

1. Peneliti meninjau kembali data dengan turun lagi ke lapangan dalam menggali beberapa informasi terhadap aktor politik, LSM BI, Koordinator satuan tugas PPA yang terlibat dalam proses. Kesahihan data sangat berpengaruh pada keterlibatan peneliti dalam melakukan pendekatan dengan informan/narasumber, sehingga informan merasa nyaman dan informasi yang diberikan sangat terbuka.
2. Meningkatkan intensitas dalam melakukan proses pengamatan yang lebih teliti terhadap objek. Agar fenomena yang didapatkan pada saat pengamatan terstruktur secara sistematis. Karena keteguhan sangat mempengaruhi kebenaran data.
3. Triangulasi merupakan metode untuk mendapatkan hasil temuan yang lebih akurat. Menjalankan tahapan-tahapan proses triangulasi dengan cara mengecek data dari beberapa informan terkait kesamaan data. Sehingga mendapatkan kesimpulan yang sama.

---

[46] Milles dan Huberman, 1992.*Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press)hal.16

[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2014)hal.405

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, penelitian ini didasari oleh kaidah-kaidah ilmu dasar metode kualitatif. Dengan menggunakan 3 tahapan penelitian, diantaranya:

1. Tahap perencanaan (tahap pra lapangan)

   Tahapan ini merupakan tahapan yang paling awal dalam penelitian, dimulai dari mencari sumber-sumber referensi yang berkaitan dengan kajian ilmu politik,sehingga menghasilkan tema, subjek dan objek penelitian.

2. Tahap pelaksanaan (Tahap Pekerjaan Lapangan)

   Tahap kedua yaitu pelaksanaan, yang dimana peneliti mengumpulkan data di lapangan, mulai dari wawancara dengan informan hingga melakukan observasi dengan subjek sasaran Bappeda, DP3AKB, LSM BI. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan *coding* (pilah data) kemudian melakukan analisis data.

3. Tahap pelaporan.

   Peneliti menulis laporan yang berisikan data-data yang telah didapatkan baik itu dari lapangan maupun studi pustaka tentang Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Studi pada Satuan Tugas perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2020), kemudian meninjau kembali data-data tersebut agar tidak ada yang terlewatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

DATA DAN ANALISIS

A. Kondisi Fisik dan Karakteristik Wilayah Penelitian

1. Gambaran Umum

Kabupaten Bojonegoro terletak di wilayah Jawa Timur bagian barat berbatasan dengan wilayah Jawa Tengah bagian timur, dengan luas wilayah 230.706 Ha**.** Sebelum tahun 2011 Bojonegoro hanya memiliki 27 kecamatan, yang sekarang sudah menjadi 28 kecamatan karena terdapat pemekaran 1 kecamatan baru, bernama kecamatan Gayam, yang sebelumnya berada di dua bagian yakni Kecamatan Kalitidu dan Kecamatan Ngasem. Dengan bukti legalitas dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Gayam di Kabupaten Bojonegoro.

Gambar 4.1 Peta batas administrasi Kabupaten Bojonegoro

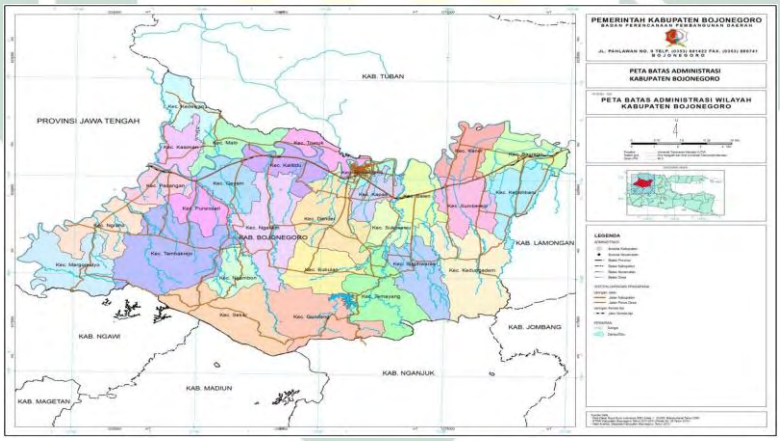

Sumber: RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2018

Di dalam sebuah perencanaan aspek yang paling utama dalam pembangunan serta pengembangan wilayah adalah adanya penduduk. Adapun pertumbuhan penduduk Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Margomulyo	22.405	22.547	22.380	22.527	22.586
2	Ngraho	41.830	41.952	42.280	46.080	46.128
3	Tambakrejo	51.848	52.006	53.750	53.938	54.380
4	Ngambon	11.016	11.028	11.795	11.611	11.548
5	Sekar	26.081	26.190	26.999	27.602	27.610
6	Bubulan	13.701	13.716	14.988	14.764	14.931
7	Gondang	24.068	24.157	24.942	25.149	25.198
8	Temayang	34.158	34.241	36.276	36.642	36.626
9	Sugihwaras	43.012	43.056	46.717	46.505	46.999
10	Kedungadem	77.072	77.165	83.673	82.776	82.671
11	Kepohbaru	59.980	60.062	65.769	65.548	65.715
12	Baureno	74.520	74.787	80.558	81.373	81.557
13	Kanor	53.894	53.923	60.441	60.627	60.743
14	Sumberrejo	67.044	67.168	71.501	71.129	71.050
15	Balen	62.418	62.645	65.574	66.197	66.427
16	Sukosewu	40.054	40.214	47.898	43.289	43.230
17	Kapas	51.703	52.277	53.154	54.844	55.007
18	Bojonegoro	85.533	86.368	86.668	85.066	85.425
19	Trucuk	36.040	36.171	39.963	38.758	38.735
20	Dander	77.983	78.601	80.700	81.867	82.466
21	Ngasem	56.798	57.007	57.337	58.999	59.343
22	Gayam	28.528	28.626	36.911	32.115	32.314
23	Kalitidu	46.749	47.038	49.375	49.787	49.598
24	Malo	30.576	30.751	31.324	31.076	30.999
25	Purwosari	28.469	28.494	33.521	29.975	29.941
26	Padangan	40.552	40.660	49.313	44.392	44.755
27	Kasiman	27.127	27.152	31.233	31.441	31.218
28	Kedewan	11.847	11.948	13.879	13.193	13.093
Jumlah		**1.225.006**	**1.229.940**	**1.249.578**	**1.307.269**	**1.310.293**

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

   a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro setiap tahunnya ada peningkatan mulai tahun 2013-2017. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016. Namun 2017 melonjak lagi di angka 67,28 Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menunjukkan tingkatan status pembangunan manusia di wilayah kabupaten Bojonegoro mencapai kata berhasil karena terus meningkat. Berikut data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro dan Perbandingan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Grafik 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro

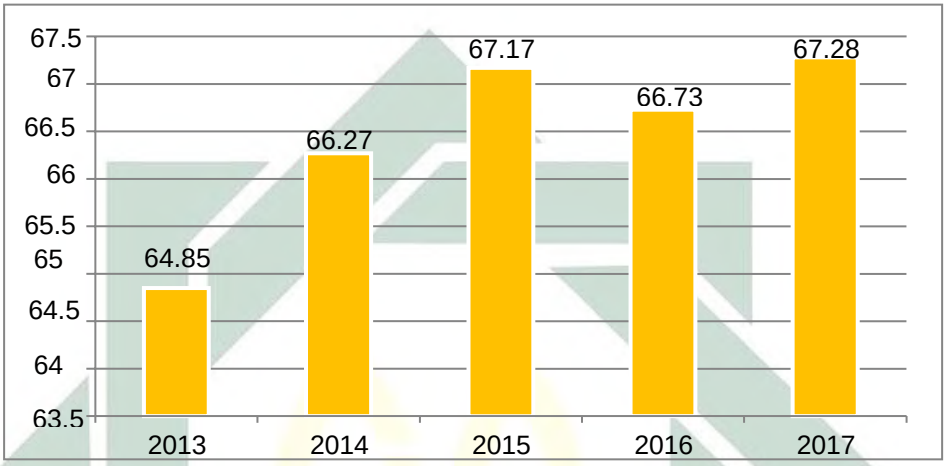

Sumber Data: BPS Kabupaten Bojonegoro

Grafik 4.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro, JawaTimur dan Nasional

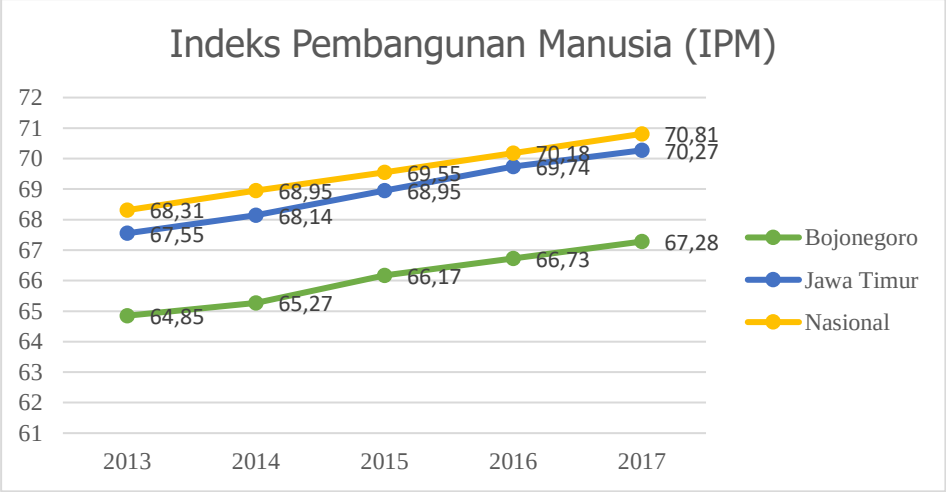

Capaian IPM Kabupaten Bojonegoro memang masih berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Meskipun demikian, Indeks Pembangunan Manusia setiap tahun mengalami peningkatan.

b. Pendidikan

1) Angka Melek Huruf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sektor pendidikan, Angka melek huruf ialah sebuah perbandingan penduduk yang memiliki usia 15 tahun ke atas yang bisa menulis dan membaca. Angka melek huruf didapatkan dari persentase jumlah penduduk diatas 15 tahun yang bisa menulis dan membaca dibagi jumlah penduduk diatas 15 tahun. Dengan hasil sebagai berikut:

Grafik 4.3 Angka Buta Aksara Kabupaten Bojonegoro tahun 2015-2017

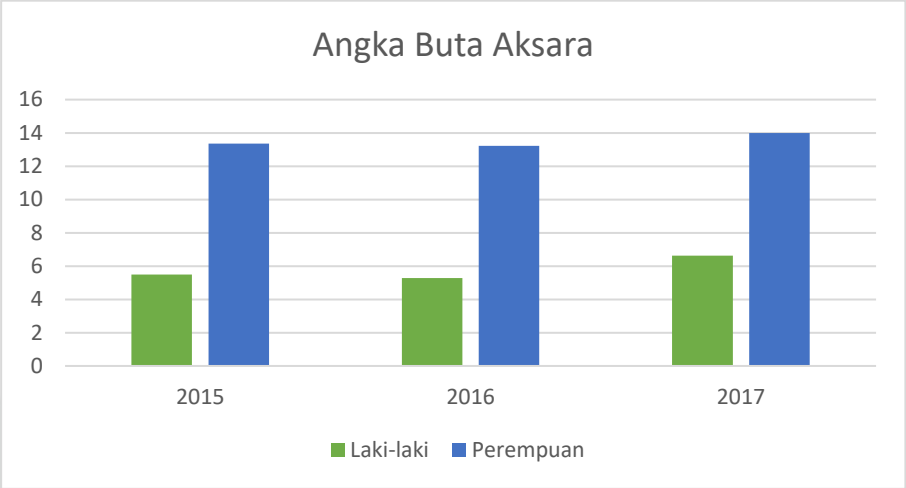

Sumber: RPJMD 2018-2023

Perkembangan Angka Melek Huruf tahun 2015-2017 belum bisa dikatakan membaik. Hal ini menunjukkan perlu upaya lanjut dalam pengentasan buta aksara di Kabupaten Bojonegoro.

2) Rata-rata Lama Sekolah

Grafik 4.4 Rata Rata Lama sekolah kabupaten bojonegoro tahun 2017-2019 berdasarkan jenis kelamin

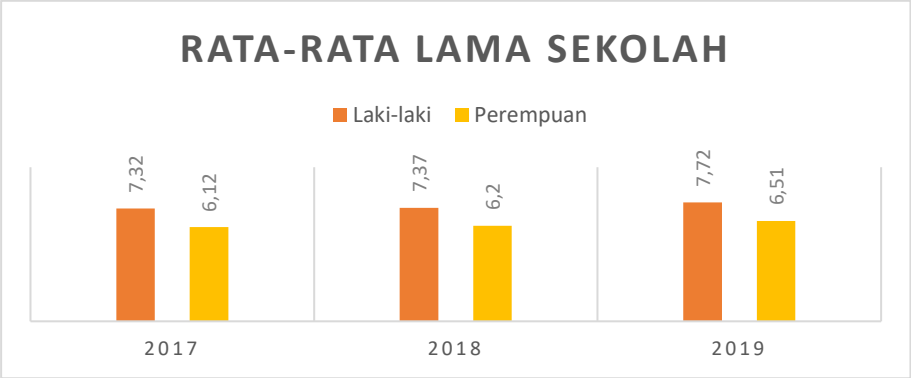

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia berbasis gender, BPS tahun 2018-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Angka Harapan Lama sekolah

Grafik 4.5 Harapan Lama sekolah kabupaten bojonegoro tahun 2017-2019 berdasarkan jenis kelamin

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia berbasis gender, BPS tahun 2018-2020

c. Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi (AKB)

Cerminan keadaan kesehatan di masyarakat terlihat dari Angka kematian bayi, hal ini dikarenakan tingkat sensitifitas pada lingkungan tempat tinggal bayi yang baru lahir mencerminkan status sosial orang tua bayi tersebut. Serta tinggi atau rendahnya angka kematian bayi, dipengaruhi oleh kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas). Untuk itu AKB menjadi acuan pemerintah dalam berupaya mengoptimalkan kebijakan khususnya di bidang kesehatan.

Tabel 4.2 Angka Kematian Bayi Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran bayi	11,89	11,84	15,05	15,17	8,76

Sumberr : RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2018-2023

Angka kematian bayi di kabupaten Bojonegoro dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Mulai tahun 2013 yang berjumlah 11,89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami penurunan drastis di angka 8,76 tahun 2017, meskipun sempat mengalami kenaikan antara tahun 2014-2016. Turunnya AKB memberikan dampak positif bagi keberhasilan banyaknya tenaga medis dan meningkatnya proporsi tingkat pendidikan perempuan, terkhusus ibu-ibu yang sudah berpendidikan tinggi.

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*) merupakan jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. *Maternal Mortality Rate* berfungsi untuk memberikan gambaran terkait tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan sekitar, dan tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pada saat melahirkan dan pasca melahirkan.

Tabel 4.3 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Bojonegoro

Indikator	**Tahun**				
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran	108,57	65,75	128,21	129,23	100,93

Sumber :RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2018-2023

Secara umum angka kematian ibu di kabupaten Bojonegoro masih tinggi dan perkembangannya naik dan turun, tahun 2014 menurun menjadi 65,75 dari 108,57 di tahun 2013, kemudian naik dua tahun berturut-turut yaitu 128,21 (2015) dan 129,23 (2016), sedangkan tahun 2017 menurun menjadi 100,93. Faktor penyebab tingginya AKI di Kabupaten Bojonegoro antara lain disebabkan preeklamsi, eklamsi, pendarahan dan penyakit penyerta seperti jantung dan infeksi.

3) Stunting

Merupakan suatu keadaan pada anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan (Kekurangan Gizi). Yang mengakibatkan penderita lebih pendek dari pada teman-teman seusianya. Munculnya kondisi Stunting

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saat janin masih dalam kandungan dan baru terdeteksi menderita stunting pada saat berumur 2 tahun. Stunting juga bisa menyebabkan angka kematian bayi dan anak. Selain itu, bisa berdampak pada kondisi postur tubuh tak ideal saat dewasa dan kemampuan kognitif penderita berkurang.

Tabel 4.4 Jumlah dan Persentase Stunting di Kabupaten Bojonegoro

Indikator	**Tahun**				
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Jumlah Stunting	7.683	8.614	7.946	6.155	5.755
Persentase (%)	9,29	10,07	9,59	7,46	7,10

Sumber :RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2018-2023

Prevalensi stunting di kabupaten Bojonegoro mulai tahun 2014 terus mengalami penurunan setiap tahun sampai tahun 2017. Upaya penurunan stunting terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Salah satu inovasi kesehatan di bidang gizi yaitu *PESTA GITA (Peningkatan Status Gizi balita)* dimana inovasi tersebut menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pos gizi, kelompok pendukung ASI di setiap desa, dan pendampingan kader.

4. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Agar meningkatnya peran perempuan di ranah publik dalam pengambilan keputusan, penting adanya dukungan pemerintah melalui program Pemberdayaan Perempuan. Dengan cara memberikan fasilitas, akses dalam menunjang pemberdayaan perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera agar perempuan dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas di seluruh sector pembangunan.

Berikut adalah data kontribusi Perempuan dalam Pembangunan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grafik 4.6 Peran Perempuan dalam Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2017

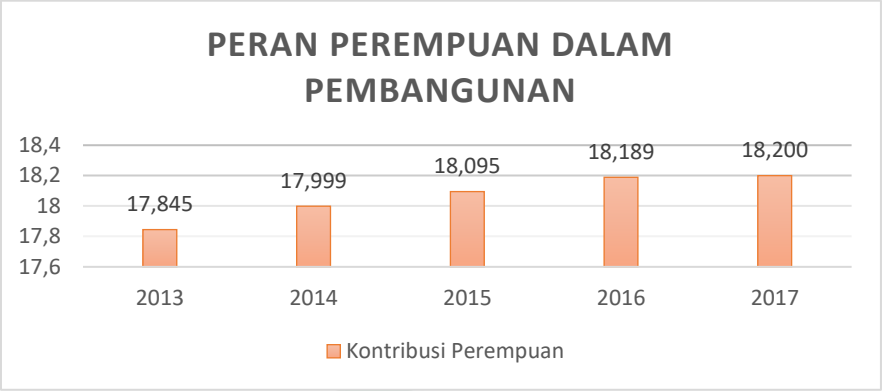

Sumber :RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2018-2023

5. Indeks Pembangunan Gender

Grafik 4.7 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan Nasional

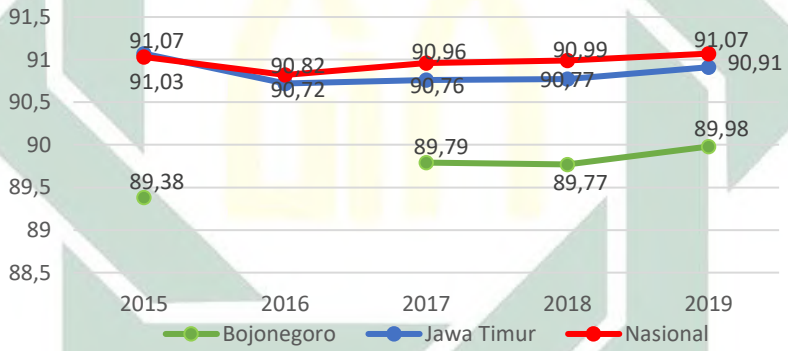

Sumber: BPS, Pembangunan Manusia berbasis Gender,2015-2020

Meskipun nilai IPG Bojonegoro masih dibawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional, naiknya angka IPG Kabupaten Bojonegoro, terindikasi bahwasannya program pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Daerah dapat dibilang cukup berhasil. Dengan adanya peningkatan angka harapan hidup perempuan, angka harapan lama sekolah perempuan, angka rata-rata lama sekolah perempuan dan pengeluaran perempuan per kapita per tahun. Menunjukkan bahwa sumber daya manusia perempuan mengalami perbaikan dengan dibuktikannya kenaikan Indeks Pembangunan Gender, meskipun masih jauh dibawah rata-rata Jawa Timur dan Nasional.

Disamping pemberdayaan perempuan tidak kalah penting adalah perlindungan terhadap anak, dimana masih banyak kasus-kasus terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan anak yang membutuhkan penanganan misalnya data-data terkait dibawah ini yang memerlukan penanganan:

Tabel 4.5 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terkait Anak Tahun 2017

No	Jenis PMKS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	130	93	223
2	Anak terlantar	351	224	575
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	5	10	15
4	Anak Jalanan	25	11	365
5	Anak dengan Disabilitas	914	601	1.515
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau yang diperlakukan Salah	19	28	47
7	Anak yang membutuhkan perlindungan khusus	27	24	51

Sumber data: RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Potret Organisasi

1) Profil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bojonegoro:

Tabel 4.5 Visi,Misi, Tugas dan Fungsi BAPPEDA

VISI	Menjadikan Bojonegoro Sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan Untuk Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Sejahtera, Dan Berdaya Saing.
MISI	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Bertanggungjawab.
TUGAS	(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. (2) Badan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis daerah di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis daerah di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi d. pembinaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; e. pelaksanaan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAPPEDA

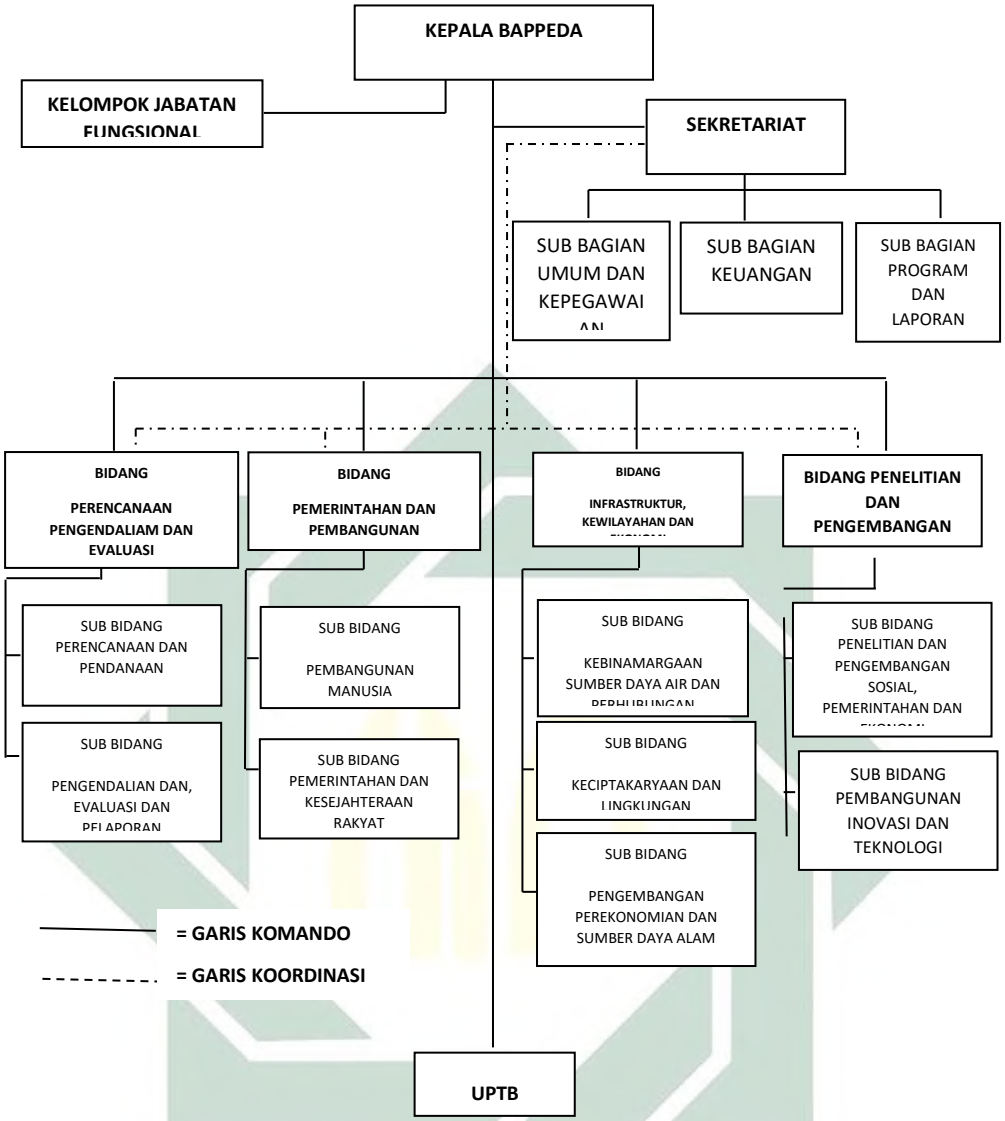

2) Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro

Tabel 4.6 Visi, Misi, Tugas dan Fungsi DP3AKB

VISI	Menjadikan Bojonegoro sebagai sumber Ekonomi Kerakyatan, dan sosial budaya lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman,sejahtera dan berdaya saing
MISI	Misi ke 3: Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkelanjutan Misi ke 4: Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TUGAS	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tugas pembantuan.
FUNGSI	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Gambar 4.3 Struktur Organisasi DP3AKB

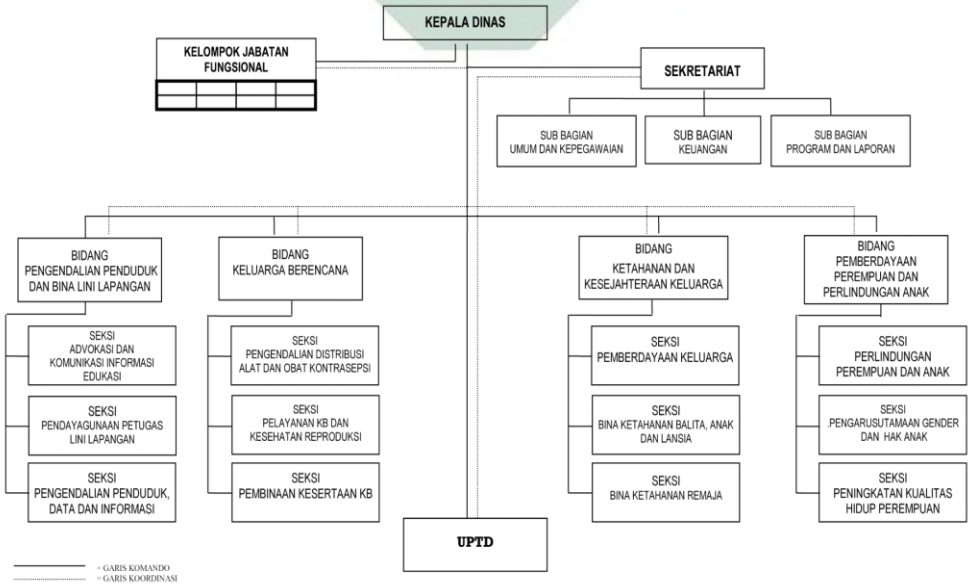

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Profil Lembaga Swadaya Masyarakat Bojonegoro Institute (BI)

Bojonegoro institute (BI) merupakan sebuah organisasi atau lembaga masyarakat sipil *(civil society Organization)* yang didirikan oleh para aktivis sosial pada tanggal 20 Februari 2005 dengan bukti legalitas Akte Notaris Didiek Wahju Indarta,SH Nomor 28 tahun 2005. Agar legalitas LSM BI di tercantum sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, maka pada tahun 2006 didaftarkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). BI berdiri dengan tujuan agar masyarakat sipil memiliki wakil dalam mengawasi,mengawal produk hukum maupun kebijakan pemerintah daerah agar terciptanya *good governance*. Maka dari itu Bojonegoro Institute didirikan untuk memberikan sumbangsih yang besar untuk kabupaten bojonegoro.

Tabel 4.7 Struktur Organisasi Bojonegoro Institute

Nama Anggota	**Jabatan**
AW Syaiful Huda	Direktur
Lilis Apriliati	Budget Advocacy Officer
Nasruli Chusna	Advocacy Officer
M. Imam Machibul Ma'arif	Staf Advokasi Officer
Joko Riyadi	IT Officer
Mohammad Ari	Office Manager
Ika Astika	Finance Manager
Cindy Puspita Sari	Finance Officer

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah mudah, Bojonegoro Institute menggandeng beberapa lembaga untuk bekerjasama. Salah satunya bermitrakan Unie eropa, Hivos, dan TI-I pada tahun 2018 yang menghasilkan program kerja yang diberi nama SPEAK *(Strengthening Publik services through the Empowerment of women-led Advocacy and social audit networKs)* yang bertujuan agar perempuan memiliki kapasitas di ranah publik, meningkatkan partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan dengan cara memberikan kelompok perempuan lokal sebuah ilmu, wawasan, kemampuan dan kapasitas agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkontribusi dan bekerjasama dalam mengurangi kesenjangan gender serta menciptakan pemerintah daerah yang responsif gender. Berdasarkan perjanjiannya program SPEAK berakhir pada tahun 2022. BI juga memiliki program kerja lainnya dengan bermitrakan beberapa lembaga dan para aktor pemangku kepentingan, berikut daftar program dan mitra Bojonegoro Institute

Tabel 4.8 Daftar program Kerja Bojonegoro Institute

Program	Mitra	Tahun
Riset aksi Participating Interest	-	2005
Studi; need assasment masyarakat sekitar tambang minyak	LP3ES	2005
Pendampingan Civil community development(9 Desa) sekitar tambang minyak	–	2005
Pembentukan Organisasi Petani Bojonegoro	-	2006
Riset Pengembangan Usaha Kecil Menengah	PUPUK-Surabaya	2006
Government Advocation for Participating InterestBasedLocalShare	-	2007
Study Implementasi saham rakyat (Cepu Block Investment)	-	2007
Community Emergency Response Management	OXFAM GB	2008
Facilitating Better Local Governance of Oil Revenue For Improved Social and Economic Development in Bojonegoro	Revenue Watch Institute LGI-Pattiro	2008-2012
Pendidikan Pemilih untuk Pemilu 2009	KEMENDAGRI	2009
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Melalui Lembaga Kepemudaan	Kemenpora-Depdiknas	2009
Pembuatan Film Dokumenter“People, Oil, Policy; Playing between welfare and curse”	RWI-LGI-Pattiro-LPAW	2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Community Score Card	RWI-ANSA-EAP	2011
Penguatan Parlemen	RWI-IPC	2011
Program Promoting Transparency & Accountability Of Subnational Oil & Gas Management For Sustainable Development In Bojonegoro	Revenue Watch Institute	2013
Studi Lapangan Peserta Pelatihan Tata Kelola Industri Ekstraktif se-Asia Pacific di Bojonegoro	Polgov UGM-RWI-USAID	2014
Reversing the Resource Curse Throught Poverty Alleviation	Ford Foundation Publish What You Pay-Ind.	2014-2015
Pilot Project sub National Open Government Partnership	World Bank Group	2015-2020
SPEAK *(Strengthening Publik services through the Empowerment of women-led Advocacy and social audit networKs)*	Uni Eropa,TI-I, Hivos	2018-2022

Adapun Visi-misi Bojonegoro Institute, antara lain:

Tabel 4.9 Visi Misi Bojonegoro Institute

VISI	Misi
Menjadi lembaga non pemerintah yang tangguh dan terpercaya dalam mempromosikan masyarakat yang merdeka dan pluralis, serta tata pemerintahan lokal yang baik	- Mengembangkan gagasan-gagasan kritis dan sikap demokratis warga masyarakat. - Memperkuat kapasitas masyarakat untuk bersuara (voice) dan keluar (exit) dari lingkungan yang tidak demokratis dan sentralistik. - Mendorong terciptanya kemitraan lokal yang berbasis pada prinsip saling percaya diantara *stakeholder* pemerintahan lokal melalui perluasan ruang publik yang bebas, otonom dan dialogis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengarusutamaan Gender dan Implementasinya

1. Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

   a. Komitmen

Dukungan politik dari pimpinan merupakan aspek yang paling utama dalam komitmen pengarusutamaan gender. Dalam hal ini, Pimpinan Kabupaten Bojonegoro ialah Bupati. Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender juga tertuang dalam strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Pada masa jabatan Bupati Hj. Anna Muawanah periode 2018-2023 secara khusus memprioritaskan kaum yang dirasa termarjinalisasi. Hal ini tertuang dalam misi ke 4 (empat) yaitu "Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa."

Tabel 4.10 RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023

MISI KE 4 **Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Mewujudkan perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kaum dhuafa yang terlindungi melalui upaya-upaya keberpihakan gender dan kemiskinan	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan dalam rangka pengarusutamaan thd perempuan, anak dan Penanganan PMKS.	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan anak (PUG dan PUHA)
		Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Peningkatan kualitas hidup PMKS dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran usaha kesejahteraan sosial	Meningkatkan penyelenggaran pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penentuan strategi pembangunan sangat menentukan keberhasilan dari realisasi program dan kegiatan. Salah satu cara penentuan strategi adalah dengan menggunakan analisa SWOT yaitu menganalisa aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di kabupaten bojonegoro. Hal ini diungkap oleh Zunaedi, Sub bidang pengendalian dan evaluasi dan pelaporan Bappeda.

"Kita memberikan riset dan mendorong baik kepada pemerintah, perusahaan dan media terkait hal-hal yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini juga dibantu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui aplikasi lapor. Sebagai layanan masyarakat untuk memberikan kritik,saran maupun aduan. Bisa juga melalui sosial media, seperti akun Instagram milik bupati bojonegoro. Sekarang kan serba canggih. Artinya kita semua bisa mengakses dan memberikan masukan. Kami mendorongnya disitu."[48]

Selain memiliki tugas untuk menyusun kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Bappeda memiliki tugas sebagai Ketua Kelompok Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) melalui penerbitan Keputusan Bupati No.188/299/KEP/412.11/2015 yang merupakan salah satu prasyarat pengimplementasian strategi Pengarusutamaan gender dalam hal mekanisme dan struktur pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, kelompok kerja pengarusutamaan gender (Pokja PUG) merupakan sebuah wadah/tempat konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender di berbagai instansi/lembaga di daerah. POKJA PUG Kabupaten Bojonegoro memiliki tugas untuk:

1) Mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing SKPD
2) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah
3) Menyusun program kerja setiap tahun
4) Mendorong terwujudnya anggaran yang berspektif gender
5) Menyusun rencana kerja Pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun

[48] Zunaedi, Kepala Sub bidang pengendalian dan evaluasi dan pelaporan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, hasil wawancara 09 April 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati
7) Memfasilitasi SKPD yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender Kabupaten Bojonegoro
8) Melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing SKPD
9) Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisas terhadap anggaran Daerah
10) Menyusun rencana aksi daerah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bojonegoro
11) Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD
12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.[49]

Hal ini juga diungkapkan oleh Maspriadi Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan BAPPEDA:

"kita memberikan fasilitas, kayak koordinator kemarin acara penilaian APE itu. Jadi bappeda koordinatornya, yang terkait dengan gender itu kan di analisa, ada yang menganalisa anggaran namanya tim driver. Tim driver itu ada 4 Bappeda ketua, anggotanya DP3KB, Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat."[50]

Tugas Pokja PUG juga dijelaskan oleh Zunaedi Kepala Sub bidang pengendalian dan evaluasi dan pelaporan, BAPPEDA:

"Kalau kami itu sebenarnya cenderung fasilitator. Karena setelah saya di kirim untuk latihan pelatih, latihan fasilitator gender itu selama 2 minggu disurabaya. Kemudian saya mendapat sertifikat setelah itu mungkin beberapa kali OPD dinas DP3AKB itu melaksanakan kegiatan, sosialisasi, biasanya kami di undang untuk memberikan beberapa materi terkait PUG itu. Kemudian memberi motivasi juga. bagaimana gender itu dan memahamkan gender focal point itu. Saran utama kami mendorong POKJA, komitmen juga sih. Kalau komiten itu yang dilihat pusat oh bupatinya komitmen, itu kalau

[49] Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/228/KEP/412.11/2015 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bojonegoro
[50] Maspriadi, Sub bidang perencanaan dan pendanaan:Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Hasil wawancara, 09 April 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipusat diukurnya dengan regulasi. Sejauh mana regulasi-regulasi itu berjalan. Dan itu yang menjadi tolak ukur pengarusutamaan gender. Kita Cuma memberikan riset dan mendorong kebijakan perencanaan, standart kebijakan kita harus berbasis gender. Itu sudah kita sinkronkan artinya strateginya harus program."[51]\

Pernyataan dari dua informan diatas menjelaskan jika tugas Pokja PUG memberikan fasilitas pengarusutamaan gender, membentuk tim teknis untuk menganalisa anggaran, menyusun rencana aksi daerah pengarusutamaan gender,dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pokja PUG.

Selain Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, dalam Permendagri No.67 tahun 2011 juga menyebutkan bahwa bagian dari aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing akan dikelompokkan/dibentuk yang namanya *Focal Point Gender* yang ditetapkan oleh kepala SKPD. Dengan demikian, masalah-masalah terkait gender tidak hanya terfokuskan pada satu atau dua sektor saja. Tetapi dengan adanya Pokja PUG dan *Focal Point Gender* berpotensi untuk mendorong seluruh OPD memperhatikan isu gender di setiap perencanaan dan penganggaran. Realitasnya dalam perencanaan dan penganggaran di sektor-sektor inti, contohnya pada sektor kesehatan dan pendidikan penerapan pedoman tersebut belum terealisasikan kedalam program dan kegiatan. Fasilitator Pengarusutamaan gender di Kabupaten Bojonegoro masih memiliki kendala, sehingga dalam pelaksanaannya masih terbilang lambat. Seperti yang dikatakan oleh Maspriadi Sub bidang perencanaan dan pendanaan Bappeda"

"Setiap tahun ada pelatihan terkait pengarusutamaan gender, termasuk pelatihan analisis responsif gender. Namun, ketika kita mengundang kepala OPD ada yang tidak bisa hadir dan diwakilkan. Ya kita berharap setelah mereka mendapat pelatihan itu kan juga mereka mengeluarkan atau transfer knowledge nya ke OPD nya masing-masing, minimal ke kepala OPD ya gitu. Karena, jika ada penilaian seperti Anugerah Parahita Ekapraya kepala OPD harus paham tentang gender. Tapi kita memaklumi juga kalau ada yang

[51] Zunaedi, Kepala Sub bidang pengendalian dan evaluasi dan pelaporan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, hasil wawancara 09 April 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang paham dan belum menerapkan karena tugasnya tidak itu saja gitu lo. Kadang-kadang yang paham ya yang ikut itu tadi."[52]

Permasalahan gender terutama dalam penyusunan anggaran yang responsif gender yang terjadi di kabupaten Bojonegoro ini belum ada penegasan untuk OPD yang belum menerapkan PUG dan PPRG. Pelatihan yang seharusnya menjadi hal penting dalam menunjang perencanaan pembangunan yang responsif gender, namun hanya dijadikan sebagai penggugur kewajiban saja. Seperti yang disebutkan dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023 bab IV, kurangnya sinkronisasi dan konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh OPD. Pemahaman yang masih bias gender juga menjadi kendala dalam internal pemerintah daerah dari segi sumber daya manusia di dalam Pokja PUG dan *Focal Point Gender*. Hal ini diungkap oleh Zunaedi Sub bidang pengendalian dan evaluasi dan pelaporan Bappeda:

"beberapa kali OPD dinas DP3AKB itu melaksanakan kegiatan, sosialisasi tentang gender. Biasanya kami diundang untuk memberikan beberapa materi terkait PUG itu dan memberikan motivasi dan memahamkan focal point gender itu. Focal point gender itu kan banyak, tapi pemahaman untuk gender sendiri masih banyak yang mengatakan kalau gender itu perempuan. memang tidak jauh dari itu cuman beda. intinya kan memang budaya mempengaruhi banyak orang, sehingga laki-laki selalu ditempatkan diatas,punya ruang, punya akses, punya manfaat yang lebih besar daripada perempuan."[53]

Pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) di kabupaten bojonegoro telah menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah, meskipun secara eksplisit Kabupaten Bojonegoro hingga tahun 2020 masih belum memiliki peraturan daerah (Perda) secara khusus tentang PUG, akan tetapi pada pelaksanaannya berpedoman pada Surat Keputusan Bupati No.188/299/KEP/412.11/2015 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bojonegoro, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66

[52] Maspriadi, Sub bidang perencanaan dan pendanaan:Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Hasil wawancara, 09 April 2021

[53] Zunaedi, Kepala Sub bidang pengendalian dan evaluasi dan pelaporan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, hasil wawancara 09 April 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2013. Selain Pergub tersebut, secara nasional Kabupaten Bojonegoro juga dalam pelaksanaan PUG mengacu pada UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita), UU No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Daerah No. 23 tahun 2014 sebagaimana diubah di no.9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah juga ada pedoman PUG, Permendagri No.67 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.[54]

b. Kebijakan

Menurut Anderson (1998)[55] Kebijakan merupakan suatu tindakan yang memiliki sebuah tujuan disertai dengan tindakan oleh seseorang maupun kelompok untuk mencari solusi sebuah permasalahan. Secara eksplisit pada misi ke 4 RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023 memiliki tujuan perencanaan Mewujudkan perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kaum dhuafa yang terlindungi melalui upaya-upaya keberpihakan gender dan kemiskinan, namun tidak dilandasi produk-produk hukum terkait. Penanganan terkait masalah perempuan yang sangat mendesak belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan di kabupaten Bojonegoro. Hal ini dapat dilihat juga pada tabel berikut produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten bojonegoro

Tabel 4.11 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2020

No.	**Tahun**		
	2018	**2019**	**2020**
1.	Nomor 1 Tentang Penyidik PNS	Nomor 2 tentang RPJMD	Nomor 1 tentang Pelestaruan Kesenian Tradisional
2.	Nomor 2 tentang Penanaman Modal	Nomor 3 tentang APBD tahun 2020	Nomor 2 tentang Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro
3.	Nomor 3 Tentang	Nomor 4 tentang	Nomor 3 tentang

[54] Yaseriza Anugrah, Kepala sub bidang pembangunan manusia:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, hasil wawancara 08 April 2021

[55] Sholih Muadi, *Konsep Teori Perumusan Kebijakan Publik*, (Jurnal Review Politik, Volume 6, Nomor 2, 2016) hal.197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018	Pencabutan Perda nomor 25 tahun 2011 tentang pendaftaran WP
4.	Nomor 4 tentang Pembubaran PD pasar	Nomor 5 tentang perubahan atas perda nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa	Nomor 4 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
5.	Nomor 5 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017	Nomor 6 tentang Perubahan APBD tahun 2019	Nomor 5 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan SKPD
6.	Nomor 6 tentang perubahan APBD tahun 2018	-	Nomor 6 tentang Pertanggungjawaban APBD 2019
7.	Nomor 7 tentang APBD tahun 2019	-	-

Sumber: Resya Famelasari, Juwita Hayyuning Prastiwi, *Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Tambang di Bojonegoro*,(Jurnal: Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 6 no.1,2021)

Berdasarkan perda diatas, posisi strategis perempuan belum termanfaatkan sepenuhnya, ruang gerak perempuan masih minim, meskipun sempat digaungkan untuk merumuskan peraturan daerah (perda) tentang pengarusutamaan gender, namun hingga masa jabatan bupati periode 2018-2023 sudah 3 tahun berjalan, namun belum ada perda tentang pengarusutamaan gender. Sejak tahun 2018 LSM Bojonegoro Institute bersama DPRD komisi C berupaya mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi tentang pengarusutamaan gender. Upaya-upaya BI dalam mendorong tata kelola pemerintah yang baik melalui program kegiatan seperti advokasi kebijakan, mengorganisir isu serta memperkuat kapasitas komunitas perempuan agar terlibat dalam perencanaan. Mengingat pentingnya Perda tersebut sebagai landasan regulasi-regulasi lain yang mengarah ke arah kesetaraan gender. Mengacu data BPS Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 yang dimana mayoritas penduduk miskinnya adalah kelompok perempuan. Dan juga masih terdapat fasilitas publik yang belum ramah terhadap kelompok rentan. Sehingga dengan adanya Perda PUG masyarakat PMKS menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan, perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah.[56]

[56] Lilis Aprilliati, Budget Advocacy Officer:Bojonegoro Institute. Hasil wawancara, 06 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perumusan regulasi tidak serta merta langsung jadi, dibutuhkan proses-proses perencanaan. Proses perencanaan ini membutuhkan perkiraan penganggaran untuk fasilitas dan data-data statistik seperti: pendapatan per-kapita, sumbangan dalam pendapatan pekerjaan, umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, keterlibatan perempuan di parlemen, dll. Data ini berfungsi sebagai landasan awal dalam proses identifikasi dan analisis kesenjangan gender. Setelah mengetahui alasan terjadinya kesenjangan gender, kemudian dirumuskan kebijakan lagi yang lebih sensitif pada kebutuhan perempuan.[57] Maka dari itu kebijakan dari pemerintah harus terstruktur secara sistematis agar strategi pengarusutamaan gender dapat terefleksikan dalam pembangunan, tutur Zunaedi, Kepala Sub bidang pengendalian dan evaluasi dan pelaporan. Bappeda:

"Di RPJMD itu sudah ada perkiraan pendanaan, penggunaan untuk fasilitas. Ada misalkan satu dua program prioritas yang lain atau muncul isu lain dimasukan lagi kedalam perencanaan. Karena kalau ndak masuk dalam perencanaan itu ndak bisa. kalau pemerintah harus terencana. Nanti ngga terencana tiba-tiba oh ini uangnya ditangan ini, itu kan ndak bisa. Jadi kebijakannya itu bisa ditunjukan melalui dukungan perencanaan. Baik dukungan perencanaan RPJMD maupun renstra OPD, kalau dibreakdown lagi namanya renja. Misalnya pada misi ke empat bu anna itu ada Rasa aman bagi perempuan anak dan penyandang disabilitas dan kaum dhuafa. Lha ini kan gender. Kebetulan ini indikatornya terkait IPG (Indeks Pembangunan Gender) nah itu. ini yang menjadi dasar PUG bojonegoro renspondif gender ya ini. Visi misi. Jadi kan ada ukurannya. Ukurannya namanya Indeks Pembangunan Gender. Itu kan di breakdown 17 program salah satunya itu ramah perempuan anak itu. salah satu kegiatannya ada TPA, ada satgas PPA itu ada, satgas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. "[58]

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender yang menjadi dasar tolak ukur pengarusutamaan gender di Bojonegoro, Kelompok Kerja

[57] Jumiati, Op.,Cit.,hal.146

[58] Zunaedi, Kepala Sub bidang pengendalian dan evaluasi dan pelaporan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, hasil wawancara 09 April 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengarusutamaan gender menyusun program kerja dan merumuskan rekomendasi perencanaan kebijakan kepada bupati yang berhasil dituangkan ke dalam misi ke empat yaitu "Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa". Yang kemudian di turunkan pada program kerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan anak.

c. Kelembagaan

Dengan terbentuknya Pokja PUG dan *Focal Point Gender*, mempermudah DP3AKB dalam menjalankan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak, termasuk dalam membuat kegiatan pelatihan pelaksanaan PUG dan PPRG bagi SDM perencana pada lembaga pemerintah dan swasta dan rapat koordinasi PUG pada lembaga pemerintah dan Lembaga Swasta. Selain Adanya Pokja PUG dan FPG, DP3AKB juga membentuk Satgas PPA yang terdiri dari seluruh unsur lapisan masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pekerja sosial dan lain sebagainya. Sehingga penguatan kelembagaan PUG tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tapi menjadi tanggung jawab masyarakat juga dalam mengintegrasikan pengarusutamaan gender.

d. Sumber Daya

Sumber daya pada prasyarat PUG yaitu sumber daya manusia yang memiliki potensi, kemampuan, kualitas, dan kepekaan terhadap gender dan sumber dana yang berupa anggaran yang memadai untuk kebutuhan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anggaran responsif gender yang tercantum dalam APBN maupun APBD. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh *leading sektor* dalam meningkatkan *capacity building* kelembagaan PUG sudah dilakukan sejak tahun 2011 dan setiap tahunnya ada pendampingan. Namun karena setiap lima tahun sekali ada pergantian Bupati, sehingga terdapat juga perubahan-perubahan program kerja dan rotasi jabatan. Hal ini dialami sendiri oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan Antar Lembaga di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hal-hal semacam inilah yang menjadi faktor penghambat dalam mengoptimalisasikan kelembagaan PUG. Para pegawai yang dirotasi jabatannya harus menyesuaikan lagi tugas-tugas dengan OPD terkait. Terlebih pada pegawai OPD yang sudah pernah melaksanakan pelatihan tentang anggaran responsif gender di rotasi jabatan ke dinas lain yang sudah tidak bertanggung jawab lagi sebagai *Focal Point Gender* mengakibatkan substansi pemahaman gender akan terputus. Berdasarkan pernyataan Marni dalam (Siti Nurhasanah, 2019:117)[59] DP3AKB dalam menjalankan program advokasi dan sosialisasi mengundang 30 OPD dengan pendelegasian 2 orang pegawai, tindak lanjut dari pelatihan yang diadakan oleh DP3AKB peserta pelatihan dibimbing untuk melakukan analisis gender dengan menggunakan alat analisis *"Gender Analysis Pathway"* hasil dari pelatihan belum seluruhnya peserta paham betul mengenai gender terutama dalam penyusunan anggaran responsif gender. Sehingga setiap tahun terus diadakan pelatihan agar SDM perencana meningkatkan kompetensinya, namun yang terjadi di setiap tahunnya pesertanya berubah-ubah. Dan terkadang tidak tepat sasaran, berdasarkan keterangan Maspriadi Kasubid Perencanaan dan pendanaan dalam melaksanakan pelatihan sasarannya utamanya yaitu hadirnya pimpinan OPD, minimal kepala OPD harus paham tentang ARG, namun ketika pimpinan OPD dan tim Focal Point Gender tidak bisa hadir, diwakilkan kepada pegawai OPD lainnya, yang artinya kehadiran tersebut hanya sebagai penggugur kewajiban saja.

e. Data Terpilah Gender

Data terpilah gender ini berupa data-data dan informasi yang terpilih berdasarkan jenis kelamin. Data terpilah gender ini berfungsi untuk memudahkan dalam pemetaan gender sebagai dasar penyusunan kebijakan.[60] Berdasarkan riset pada website BPS kabupaten Bojonegoro masih kurang tersedianya data terpilah antara laki-laki dan perempuan dari tahun ke tahun. dan juga belum memiliki aplikasi yang bisa diakses oleh publik terkait

[59] Siti Nur Hasanah, Skripsi. *Evaluasi Anggaran Responsif Gender (Studi Kasus Program Strengthening Publik Services Through The Empowerment Of Women-Led Advocacy And Social Audit Networks dalam Mengadvokasi Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro oleh LSM Bojonegoro)*(Malang:Universitas Brawijaya,2019)hal.117

[60] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi gender dan anak, Tutur Yaseriza Anugrah L, selaku Kasubid Pembangunan Manusia BAPPEDA

"Info kegiatan di website pemkab, yang leaflet yang dibuat DP3AKB, kemudian juga ada di website desa, tapi memang kita belum ngemas, dikelompokkan dalam sub direktori ini gender gitu ndak, tapi berita-berita yg sifatnya umum."[61]

f. Analisis Gender

Kabupaten Bojonegoro menggunakan alat analisis *Gender Analysis Pathway*, dan *Gender Budget System* dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar responsif gender. Contohnya ada Anugrah Parahita Ekapraya itu untuk mengukur pencapaian kegiatan yang berkaitan gender yang melibatkan seluruh OPD. Seperti dinas kesehatan yang ada kaitanya dengan gendernya itu seperti kan kayak gitu. DP3AKB memfasilitasi kegiatan tersebut, bagaimana draf Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang sudah dibuat oleh seluruh OPD tersebut kemudian bisa dikatakan berperspektif gender. PPRG di katakan perspektif gender ketika dia sudah dilakukan proses analisisnya.[62]

g. Partisipasi

Dalam negara demokrasi partisipasi selalu dikaitkan dalam seluruh produk kebijakan. Hal ini dikarenakan tanpa partisipasi dari masyarakat, negara akan menjadi negara yang otoriter. Maka dari itu, peran masyarakat sipil dalam berkomitmen dalam menuntaskan isu-isu gender sangat penting dalam kategori prasyarat PUG. Sejak tahun 2018 LSM Bojonegoro Institute bersama TI-I dan Hivos berupaya mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi tentang pengarusutamaan gender melalui program kerja yang diberi nama SPEAK *(Strengthening Publik services through the Empowerment of women-led Advocacy and social audit networKs)* program ini diinisiasi oleh Uni Eropa. Tujuan dari program SPEAK ini agar perempuan berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan dan penganggaran kebijakan, dengan cara memberdayakan kelompok perempuan untuk memperoleh akses informasi

[61] Yaseriza Anugrah, Kepala sub bidang pembangunan manusia:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, hasil wawancara 08 April 2021

[62] Fiyanti Soeci Hidayanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Hasil wawancara, 16 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara mudah,dan meningkatkan partisipasi perempuan di dalam forum-forum publik. Adapun kegiatan dari program SPEAK ini diantaranya: Berbagai bentuk kegiatan seminar, *Forum Group Discussion* (FGD), dan pelatihan Pemberdayaan perempuan yang bertujuan meningkatkan kapasitas perempuan sehingga mampu berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan dan berani melakukan laporan terhadap pelayanan publik yang tidak sesuai. Keterlibatan kelompok perempuan dalam program SPEAK ini bertujuan agar kelompok perempuan tersebut dapat mengetahui *step by step* proses advokasi ARG. Sehingga, mereka dapat menganalisis kenapa bisa terjadi kesenjangan gender di masyarakat, yang kemudian menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka melalui advokasi anggaran melalui program SPEAK. Kelompok perempuan yang digaet oleh BI diantaranya: Dosen Universitas Bojonegoro, Koalisi Perempuan Indonesia, PD AISIYAH, Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), ada juga yang dari PKK dan IPPNU. Tak hanya dari kalangan kelompok perempuan saja yang tergabung dalam program kegiatan ini, tetapi BI juga menggandeng aktor pemerintah daerah seperti DP3AKB, Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, BAPPEDA dan Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Dengan demikian, hasil dari program SPEAK mendapatkan respon yang baik dari pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan pelibatan Bojonegoro Institute dan kelompok perempuan yang terlibat dalam program SPEAK dalam penyusunan hal-hal yang ada kaitannya dengan gender oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Bojonegoro institute bersama dengan komunitas perempuan dampingan melakukan banyak kajian dan membawa hasil analisis kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro khususnya Bappeda mendampingi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus utamaan gender dan diikutsertakannya pada rapat pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), diikutsertakan dalam menginput data-data kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di kabupaten Bojonegoro, dan pengikutsertaan dalam rapat koordinasi terkait Pengarusutamaan Gender (PUG). Tutur Lilis Selaku *Budget Advocacy Officer*, Bojonegoro Institute:

"Bojonegoro institute bersama dengan komunitas perempuan dampingan melakukan banyak kajian dan membawa hasil analisis kepada Pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Bojonegoro khususnya Bappeda mendampingi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus utamaan gender dan diikutsertakannya pada rapat pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), diikutsertakan dalam menginput data-data kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di kabupaten Bojonegoro, dan pengikutsertaan dalam rapat koordinasi terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rapat koordinasi bersama DP3AKB munculah usulan saat itu untuk perlunya dibuat lembaga pendampingan di level terkecil yaitu desa. Saat itu kami bersama LPA mendorong itu."[63]

Adanya partisipasi LSM BI dalam rapat koordinasi bersama DP3AKB memunculkan sebuah gagasan yang perlu diterapkan di kabupaten Bojonegoro yaitu dengan di bentuknya sebuah lembaga pendampingan di level terkecil yaitu desa. Hal ini dikaitkan dengan adanya relawan-relawan untuk mendampingi perempuan dalam menyelesaikan berbagai masalah kekerasan. Inisiasi pendampingan yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten bojonegoro, berangkat dari berbagai masalah sosial di lingkup desa, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu masyarakat Kecamatan Kepohbaru berinisiatif untuk menjadi relawan sekaligus menjadi pendamping bagi korban kekerasan yang tidak berani melapor. Sejak saat itu, terdapat beberapa relawan lain yang ikut serta mengaungkan aksi perlindungan perempuan dan anak. Dengan adanya relawan-relawan dari tingkat kecamatan hingga desa yang antusias dalam melakukan pendampingan terhadap perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bojonegoro. Maka tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), yang dikukuhkan oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro, tutur Ummi Hanik Koordinator Satgas PPA Kecamatan Kepohbaru.

"Banyaknya kasus-kasus yang ada di desa, mereka kebanyakan dari perempuan-perempuan yang banyak yang terkena KDRT, Disitu terus ada relawan-relawan dari kita, jadi kita menawarkan diri sebagai relawan, sebagai pendamping mereka saat mereka waktu menghadap ke kepolisian, apalagi sampai menuju ke ranah sidang. Kan dari pihak perempuan banyak

[63] Lilis Aprilliati, Budget Advocacy Officer:Bojonegoro Institute. Hasil wawancara, 06 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak berani. Jadi hal-hal seperti itu terus kita menawarkan diri, kemudian muncul dari beberapa kecamatan, siapa yang mau. Terus akhirnya merambah ke desa-desa. Jadi desa per kecamatan tadi ada desa-desa siapa yang berani menjadi pendamping seperti itu. akhirnya berdiri juga sebagai relawan-relawan itu. sejak itu dari PLKB, dari PLKB merekrut kita-kita yang sudah menjadi pendamping-pendamping tadi, akhirnya muncul satgas. Dan di SK kan oleh bupati."[64]

Peran serta LSM dan masyarakat sipil dalam berkomitmen menuntaskan isu-isu gender akan semakin berpengaruh dalam perwujudan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, partisipasi dan pendapatan manfaat dari seluruh sektor pembangunan.

3. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Satuan Tugas perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bojonegoro tahun 2020

Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) merupakan satuan tugas yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah daerah untuk menangani kasus/masalah terkait perempuan dan anak yang pelaporannya kepada organisasi layanan perempuan dan anak. Satgas PPA ini merupakan paket kebijakan program prioritas unggulan pemerintah kabupaten bojonegoro ke-9 yaitu Lingkungan ramah perempuan,anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa dan taman penitipan anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak pasal 6 yang berbunyi:

"Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana berikut dalam pasal 5 satgas PPA mempunyai fungsi: a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di daerahnya; b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; c. melindungi perempuan dan anak dari di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya; d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan e. melakukan

[64] Ummi Hanik, Koordinator kecamatan kepohbaru: Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bojonegoro, hasil wawancara, 21 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut."

Dalam pasal 4 ayat 2 juga menyebutkan *"Kedudukan Satgas PPA tingkat kabupaten/kota berada di bawah koordinasi kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat kabupaten/kota."*

Sejalan dengan PERMEN PPA, melalui DP3AKB kabupaten Bojonegoro mendukung pencapaian Misi ke-3 Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023 yaitu *"Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak"*, dan Misi ke-4 *"Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa"* Dengan sasaran strategis yaitu meningkatnya pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak. Yang bertujuan Meningkatkan kualitas Hidup Perempuan, Kesetaraan Gender dan anak dalam pembangunan. DP3AKB juga memiliki fungsi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Kebijakan merupakan sebuah pedoman pelaksanaan kegiatan atau strategi yang mengatur suatu mekanisme untuk pelaksanaan pencapaian tujuan. Dengan kata lain kumpulan keputusan yang menentukan secara rinci tentang bagaimana strategi yang akan dilaksanakan. Berdasarkan makna kebijakan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Program Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan isu strategis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:

a. Pengarusutamaan gender dan hak anak
b. Perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak
c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan dinas, instansi, lembaga organisasi masyarakat dan dunia usaha serta media dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
d. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan
e. Akurasi data serta informasi gender dan anak

Maka dari itu, pada tahun 2019 DP3AKB membentuk Satgas PPA untuk menekan angka kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Yang harapannya dapat meningkatkan kesetaraan gender di kabupaten bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.4 Strategi Pengarusutamaan Gender

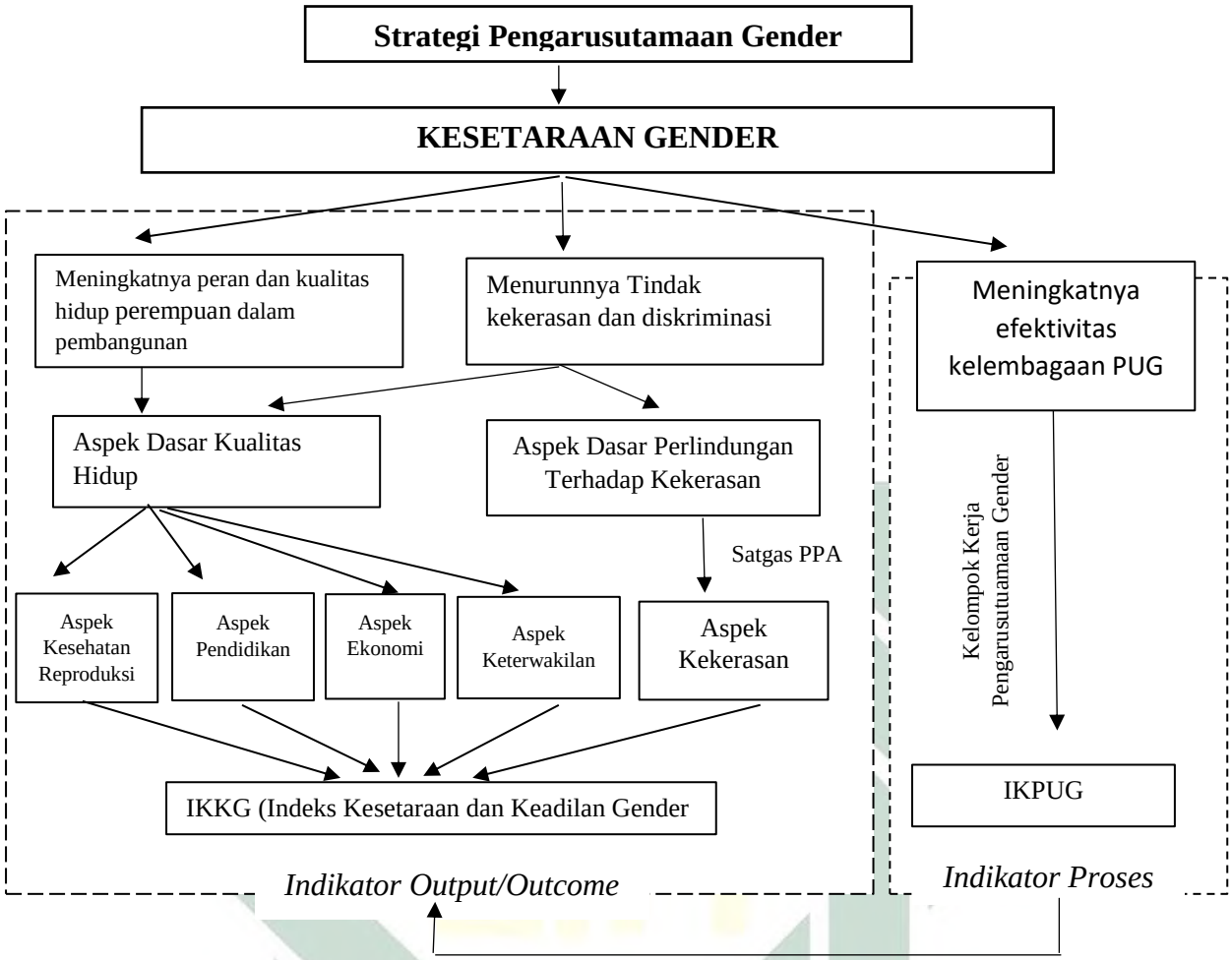

Sumber: Kementerian PPN/BAPPENAS, *Kertas Kebijakan.* 2012.

Indikator-indikator diatas menunjukkan bahwa adanya hubungan timbal balik antara indikator *output* dan indikator proses. Jika nilai IKPUG sebagai indikator proses semakin meningkat, maka akan berdampak positif juga terhadap indikator *output/outcome*. Keefektifan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender seperti Kelompok Pengarusutamaan Gender dalam meningkatkan indeks pengarusutamaan gender, serta peran Satgas PPA dalam membantu menurunkan tindak kekerasan dan diskriminasi pada perempuan dan anak akan semakin berpengaruh dalam perwujudan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, partisipasi dan pendapatan manfaat dari seluruh sektor pembangunan. Peran kebijakan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender bisa dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai tolak ukur keberhasilan program oleh sebuah negara untuk mengurangi kesenjangan gender di seluruh sektor pembangunan.[65]

Implementasi program pemberdayaan perempuan ini dapat dijelaskan secara umum bahwa merupakan sebuah proses yang dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender. Dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan, keterlibatan pihak yang diberdayakan sangat penting, sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai dengan maksimal. Keterlibatan perempuan dalam menjadi kader Satgas PPA, merupakan upaya dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya masyarakat pedesaan secara efektif dan efesien mengingat peran desa sebagai objek pembangunan yang potensial.

Untuk mengoptimalkan peran satgas PPA pada bulan Oktober 2019 dalam program peningkatan Perlindungan Hak Perempuan, DP3AKB mengadvokasi dan mensosialisasi kebijakan pencegahan terhadap perempuan, serta penguatan forum pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak dengan cara memberikan pelatihan kepada seluruh anggota Satgas PPA dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Agenda tersebut berjalan selama 7 hari berturut-turut. Agar kegiatan lebih efektif, Pelatihan tersebut diadakan secara bergantian sesuai pembagian wilayah satgas dan jadwal pelatihan. Dengan adanya satgas PPA ini merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah kepada masyarakat dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.[66] Berbekal pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten bojonegoro, satgas PPA menjadi lebih paham dalam melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat dalam mencegah tindakan kekerasan. Pada Pelaksanaannya, yang menjadi Hambatan Itu sendiri itu terdapat di masyarakatnya. Yang dimana masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan satgas PPA, masih terdapat juga masyarakat yang mengetahui satgas PPA dan menerima sosialisasi dari Satgas PPA tapi diabaikan, Tutur Ummi Hanik, Koordinator Satgas PPA Kecamatan Kepohbaru:

---

[65] BAPPENAS, *Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG) Kajian awal*, (Jakarta:Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,2012)hal. xv

[66] Dinas Komunikasi dan Informatika, *Pemkab Gelar Bimtek Untuk Optimalkan Peran Satgas PPA se Kab. Bojonegoro*, https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/615, diakses pada 10 juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan sosialisasi itu tidak mudah ternyata, banyak ibu itu yang bisa menerima, banyak juga tidak menerima. Tidak menerimanya karena apa? Mengabaikan saat kegiatan."[67]

Satgas PPA telah berupaya dalam menjalankan tugasnya melalui kegiatan sosialisasi hingga ke pelosok desa, dengan cara ikut serta dalam kegiatan perempuan seperti majelis taklim, PKK, dan kader gizi. Selama ini dari segi perlindungan anak, satgas PPA gencar memberikan sosialisasi terkait pengawasan terhadap anak pada era revolusi 4.0 yang perkembangan teknologi semakin meningkat. Terutama pada saat pandemi covid-19, Satgas PPA mengalami kesulitan dalam memberikan arahan kepada ibu dalam pengawasan anak. Dengan adanya himbauan dari pemerintah terkait *School From Home* (SFH) dan *Work From Home* (WFH), pemantauan terhadap anak mulai tidak terkontrol. Dengan dalih mendapatkan mata pelajaran melalui online, orang tua membiarkan anak-anaknya memainkan *gadget*.[68]

Perempuan menjadi salah satu sasaran dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai contoh di Kecamatan Kepohbaru terdapat 100 orang satgas berjenis kelamin perempuan dan 1 orang berjenis kelamin laki-laki.[69] Ini artinya, tujuan pembentukan satgas PPA bukan hanya sebagai fasilitator dalam melakukan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak. Tetapi juga sebagai wadah untuk memberdayakan perempuan dengan cara meningkatkan *capacity building*, karena anggota Satgas yang sebagian besar adalah seorang perempuan. Dengan adanya pelatihan-pelatihan dari DP3AKB kepada satgas PPA, hal ini bisa menumbuhkan motivasi dan membuka kesempatan bagi perempuan, khususnya di desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas yang dimiliki. Yang menjadi poin pentingnya yaitu penempatan kaum perempuan sebagai salah satu *stakeholder* aktif. Terjadinya pemberdayaan ini ketika perempuan sadar bahwa potensi yang dimilikinya bisa dikembangkan ke arah yang positif dan bisa bermanfaat untuk orang lain dengan cara masuk ke ranah publik. Seperti yang dikatakan Ummi Hanik bahwa :

---

[67] Ummi Hanik, Koordinator kecamatan kepohbaru: Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bojonegoro, hasil wawancara, 21 Juni 2021

[68] Ummi Hanik, Ibid., hasil wawancara, 21 Juni 2021

[69] Ummi Hanik. Ibid., hasil wawancara 21 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Awalnya itu saya dari kepohbaru, Kita kan dulunya sering bertemu dengan ibu-ibu dan wali murid di grup-grup PAUD. Nah disitu kita sering bertemu, sering berbincang-bincang tentang permasalahan-permasalahan yang ada di desa seperti kasus perselingkuhan, KDRT dan lain sebagainya. Mungkin karena ada rasa kemanusian dan memiliki pengalaman, akhirnya sedikit-sedikit ada yang minat untuk menjadi relawan, hingga akhirnya anggotannya merambah ke desa-desa."[70]

Berdasarkan data-data tersebut, bahwa satgas PPA merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender melalui program kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terdapat dua tingkatan level kebijakan publik, yaitu di tingkat nasional dan tingkat daerah. Bentuk kebijakan di daerah merupakan bagian dari pelimpahan wewenang tingkat pusat kepada pimpinan daerah. Sehingga substansi kebijakan sangat berpengaruh pada keefektifitasan implementasi kebijakan dalam mempengaruhi korelasi terhadap sasaran kebijakan. yang selanjutnya akan berpengaruh pada hasil yang diinginkan. Efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh pelaksana kebijakan, substansi kebijakan, dan lingkungan kebijakan.[71]Maka dari itu, tingkat keberhasilan adanya program pemberdayaan perempuan dan anak melalui Satgas PPA bisa dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George Edward III (1980), berikut penjelasannya:

1. Komunikasi

   Komunikasi ini merupakan modal awal dalam sebuah pengimplementasian. Yang dimana memiliki peran sebagai media penyampaian pesan antara implementor (pelaksana program) dan pembuat kebijakan *(Policy maker)*. Idealnya, arah komunikasi dalam implementasi kebijakan tidak hanya dari atas ke bawah *(Top down)* saja, tetapi bisa juga dari arah bawah ke atas *(bottom up)*. Pembentukan Satgas PPA merupakan hasil komunikasi dari bawah ke atas *(bottom up)*. Berawal dari masyarakat sipil yang berani mendampingi kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak di desa dengan sukarelawan, akhirnya pada tahun 2019 Pemerintah Bojonegoro

[70] Ummi Hanik, Koordinator kecamatan kepohbaru: Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bojonegoro, hasil wawancara, 21 Juni 2021
[71] Tachjan, *Implementasi kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI,2006) Hal.18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui DP3AKB membentuk satuan tugas perlindungan perempuan dan anak. Terbentuknya satgas PPA sendiri sebenarnya sudah terintegrasi dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak. Namun, pada tahun 2019 baru terealisasikan pembentukan Satgas. Terbentuknya satgas PPA ini juga di dorong oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Bojonegoro Institute yang membantu pemerintah daerah dalam memberikan riset terkait permasalahan yang terjadi di lingkup kabupaten Bojonegoro dan membantu dalam meningkatkan kapasitas perempuan melalui program SPEAK, Menurut AW Syaiful Huda dalam (Siti Nur hasanah,2019:138)[72] Output dari program kegiatan BI salah satunya penetapan anggota Satgas PPA, melalui Program SPEAK tersebut BI memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kelompok perempuan, yang kemudian kelompok perempuan yang sudah dilatih itu melaksanakan proses advokasi dan melakukan pengawalan pada proses audiensi. Mereka menyuarakan aspirasi-aspirasi kepada OPD terkait dan jika ada kesempatan menyampaikan kepada Bupati secara langsung. Karena tujuan dari program SPEAK ini yaitu bagaimana pengimplementasian dari ARG bisa optimal. Sependapat dengan Direktur BI, Lilis Aprillianti selaku Manager Program SPEAK juga mengatakan bahwa:

"Tentu kami selalu melakukan pretest dan posttest setiap pelatihan untuk melihat kapasitas perempuan sebelum dan setelah dilatih. Kami memiliki target kelolosan peserta 70%, jadi kalau dalam pelatihan yg gagal lebih dari 30% ya dilakukan remidial. Selain itu, perempuan telah berani melakukan laporan melalui aplikasi lapor.go.id tentang gender, pendidikan dan kesehatan perempuan. Yg jelas penyusunan RAD PUG juga didorong penyelesaiannya melalui aplikasi tersebut."[73]

Komunikasi dan koordinasi antara masyarakat sipil dan instansi pemerintah merupakan salah satu bagian yang menjadi penyelaras dalam pemanduan pelaksanaan kebijakan sehingga menghasilkan sebuah solusi untuk mengintegrasikan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh KEMENPPPA 6/2017. Komunikasi yang terjadi di internal program yaitu

[72] Siti Nur Hasanah, Ibid.,hal. 138
[73] Lilis Aprilliati, Budget Advocacy Officer:Bojonegoro Institute. Hasil wawancara, 06 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara pelaksana kebijakan (Satgas PPA) dan *Policy Maker* (Pemerintah Daerah) sudah berjalan dengan baik, pemanfaatan teknologi revolusi 4.0 menjadikan komunikasi antar Satgas PPA dan DP3AKB lebih mudah. DP3AKB mengontrol dan mengawasi perkembangan satgas PPA melalui aplikasi *group whatsapp*.

"ini lo hasil rekapan laporan, setiap bulan mereka membuat laporan, laporan yang sifatnya ada kasus dan sifatnya pelaksanaan kegiatan. Tiap satgas di desa itu membuat laporan pribadi, kemudian diakomodir di dalam laporan bulanan, ini nanti laporannya tak koreksi, ini masih terus dilakukan pendampingan Kebanyakan laporan mereka ada yang sudah benar ada yang belum."[74]

Koordinasi merupakan sebuah metode yang memiliki posisi yang penting dalam implementasi kebijakan. Semakin baik komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, tingkat kesalahpahaman informasi semakin kecil. Terkait tugas dari Satgas PPA yang melindungi perempuan dan anak, Ibu Ummi Hanik mengatakan bahwa:

"Kalau sebelum pandemi, dulu kita sosialisasi ya masuk ke waktu pertemuan PKK, ada majelis taklim. Nah, kalau sekarang waktu pandemi, ini ada group whatsapp, grupnya jama'ah tahlil, grupnya PKK, grupnya apa saja kita masuki, kita sosialisasi terkait perlindungan anak dan kita juga menemukan kekerasan perempuan itu dari wa juga. Semisal dari group RT kemarin ada kejadian di desa Pejok sekarang lagi kita tuntaskan belum selesai juga karena suaminya yang kena KDRT itu lagi sakit. Kita tahunya juga dari wa. Gimana bu ini, ada kejadian ini dari desa ini. Ya kita turun, bagaimana awalnya, kita mendampingi di polseknya juga. Satgas desa melaporkan kepada saya yang kecamatan menyampaikan kepada kabupaten itu ke PPA."[75]

Dari segi komunikasi secara internal sudah efektif dan efisien dilakukan karena dapat dilakukan pemantauan setiap saat dan mengetahui informasi-informasi untuk penanganan secara cepat. Edward III juga menjabarkan komunikasi kedalam beberapa dimensi, yaitu: *Dimensi transmisi,*

---

[74] Fiyanti Soeci Hidayanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Hasil wawancara, 16 Juni 2021

[75] Ummi Hanik, Koordinator kecamatan kepohbaru: Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bojonegoro, hasil wawancara, 21 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menghendaki agar tujuan dari kebijakan bukan hanya untuk para pelaksana kebijakan saja, tapi juga harus tersampaikan kepada target/sasaran dan pihak lain yang berkaitan dengan kebijakan. dari dimensi transmisi ini, yang menjadi kendala yaitu ketika satgas PPA sosialisasi kepada masyarakat, karena latar belakang masyarakat berbeda-beda, sehingga dengan adanya sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh satgas PPA ada yang merespon dengan baik, ada yang masih kebingungan, terdapat juga tidak mau menerima sosialisasi dengan mengabaikan kegiatan Satgas PPA. Di samping itu, sosialisasi yang dilakukan secara daring juga kurang efektif untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan, Satgas tidak bisa melihat secara langsung bagaimana respon masyarakat terhadap sosialisasi yang telah diberikan oleh satgas. Selanjutnya, *Dimensi Kejelasan*, menginginkan bahwasannya kebijakan yang disampaikan bisa diterima dengan jelas kepada kelompok sasaran. Jika informasi yang diberikan tidak ada kejelasan, masyarakat tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Menurut Fiyanti Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

"Dengan keberadaan teman-teman satgas di desa. Otomatis kan ada kegiatan promotif ya istilahnya. Kami satgas ppa, tugas kami ini. Jadi mereka aktif melakukan kegiatan ndak Cuma dibidang perlindungan saja, sosial juga, di bantu teman-teman dari bidang KB ini yang kadang juga ikut bantu. Jadi masyarakat akan lebih familiar terhadap satgas PPA. Kemudian dengan kondisi-kondisi seperti itu, akhirnya mungkin pikiran masyarakat ada sedikit perubahan atau pergeseran, dalam arti. O.. ternyata nek kasus ngeneki nggak harus tabu opo piye. Jadi memang kayak ada sinergi atau ada korelasi ketika ada satgas sejumlah itu ada peningkatan adanya kasus".[76]

2. Sumber Daya

Setelah adanya komunikasi antara implementor dan pembuat kebijakan. Yaitu dibarengi dengan memanfaatkan sumber daya. Bisa berupa staf yang berkompeten dalam menjalankan tugasnya, perintah, dan saran dari berbagai pihak. Selain itu, harus ada keseimbangan antara keahlian yang harus

[76] Fiyanti Soeci Hidayanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Hasil wawancara, 16 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimiliki dan jumlah staff yang dibutuhkan.[77] Terdapat 1.600 anggota satgas yang tersebar di seluruh Kabupaten Bojonegoro, di setiap desa terdapat anggota satgas yang berjumlah 2-3 orang, yang terdiri dari macam-macam unsur masyarakat sipil seperti: Guru, keluarga, jama'ah tahlil,PKK dll. Yang sudah berkompeten di bidangnya, karena yang terlibat di dalam satgas berasal dari sukarelawan, artinya, mereka memiliki minat, pengalaman, koneksi dan kemampuan dalam mendampingi perempuan dan anak. Sedangkan, pemilihan koordinator/ketua satgas PPA di pilih oleh para anggota, yang kemudian diusulkan untuk menjadi koordinator/ketua.Tutur Ummi Hanik:

"Karena seringnya mengikuti pendampingan, seringnya mengawal kegiatan-kegiatan itu, akhirnya dia yang berpengalaman dijadikan ketua."[78]

Sumber daya manusia yang terdapat di Satgas PPA sebagian besar adalah perempuan/ibu. Mereka sudah bekerja sesuai tugasnya sebagai promotif, namun tidak stag pada kegiatan yang sifatnya kuratif (bertindak setelah ada kasus). Mereka menginisiasi kegiatan-kegiatan sosial baru, kegiatan yang bersikap preventif.

Pada dasarnya pelayanan yang diberikan oleh anggota Satgas PPA dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani masalah perempuan dan anak, sejauh ini sudah sesuai dengan tupoksinya. Dari perspektif Pembuat Kebijakan juga sudah memberikan pelatihan-pelatihan/bimbingan teknis kepada seluruh anggota satgas setiap tahunnya. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut dengan membagi kelompok satgas berdasarkan wilayah,sehingga pelatih/narasumber bisa lebih interaktif kepada peserta. Dan peserta akan lebih paham dan menerapkan ilmu-ilmunya kepada masyarakat.

Dari segi Sumber daya finansial (dana) para anggota satgas diberikan insentif uang senilai Rp. 100.000/bulan, sedangkan untuk kegiatan sosial lainnya mereka memakai uang pribadi untuk menggerakan kegiatan-kegiatan tersebut. Selama ini Pemerintah Kabupaten belum memberikan fasilitas-fasilitas untuk menunjang keberhasilan program. Tutur Umi Hanik:

---

[77] Zahrotun Nuraini,.Op,.Cit,.hal.21

[78] Ummi Hanik, Koordinator kecamatan kepohbaru: Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bojonegoro, hasil wawancara, 21 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kita nggak ada anggaran untuk pendamping. Kita relawan semuanya. Sedangkan fasilitas yang diberikan pemkab berupa insentif tiap bulan 100rb/orang".[79]

Dalam implementasi kebijakan, sumber daya sangat berpengaruh pada efektivitas terlaksananya kebijakan. Efektifitas implementasi kebijakan berdasarkan sumber daya bergantung pada sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang telah ditentukan oleh pemerintah, apakah sudah memadai atau belum. Yang menjadi kendala saat ini, fasilitas-fasilitas yang kurang memadai. Sehingga pemerintah perlu untuk meninjau kembali anggaran untuk memberikan fasilitas yang diberikan kepada satgas PPA agar lebih responsif gender. Pada program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak ini belum dilakukan analisis responsif gender.

3. Sikap Birokrasi atau Pelaksana

Sikap birokrasi merupakan karakteristik dan watak yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan yaitu: Disiplin, kejujuran, komitmen, kecerdasan, adil,dan demokratis. Berhasil atau tidaknya tujuan dari kebijakan tergantung pada implementor. Sejauh ini, sikap anggota satgas PPA sudah memenuhi karakteristik dari model implementasi kebijakan Edward III, Seperti yang dikatakan oleh Fiyanti kabid Pemberdayaan dan perlindungan anak:

"Setiap bulan mereka membuat laporan, laporan yang sifatnya kasus sama yang tidak. Tiap satgas di desa itu membuat laporan pribadi, kemudian diakomodir di dalam laporan bulanan, ini nanti laporannya tak koreksi, ini masih terus dilakukan pendampingan. Kebanyakan laporan mereka ada yang sudah benar ada yang belum."[80]

Artinya, Anggota Satgas PPA memiliki komitmen, disiplin, serta kecerdasan dalam mengimplementasikan kebijakan. Meskipun berdasarkan informasi yang diberikan oleh narasumber masih terdapat laporan yang kurang benar, DP3AKB masih berupaya untuk mendampingi mereka dalam menyusun laporan. Karena satgas PPA merupakan pekerjaan sampingan,

[79] Ummi Hanik, Koordinator kecamatan kepohbaru: Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bojonegoro, hasil wawancara, 21 Juni 2021

[80] Fiyanti Soeci Hidayanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Hasil wawancara, 16 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkadang mereka lebih mengutamakan pekerjaan utamanya. Namun berbeda dengan yang dikatakan Ummi Hanik selaku Koordinator Satgas PPA yang mengatakan bahwa:

"Jika mereka tidak bisa mengikuti kegiatan, mereka izin. Biasanya mereka tidak hadir jika sedang sakit atau sedang tidak dirumah, tapi lebih sering hadir sih."[81]

Artinya, sikap dari para pelaksana kebijakan sudah terlihat dari segi tanggung jawab, disiplin, komitmen dan kecerdasan dalam berinovasi-inovasi dalam menginisiasi kegiatan preventif sejauh ini sudah baik, namun perlu adanya peningkatan-peningkatan agar implementasi kebijakan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Organisasi

Para pelaksana kebijakan memiliki otoritas dalam menjalankan tugas dan wewenang. Pada umumnya, birokrasi memiliki acuan standar dalam bekerja, hal ini biasanya tertuang dalam Prosedur kerja atau biasa dikenal dengan Standard Operating Procedures (SOP).[82] Satgas PPA sudah memiliki Standard Operating Procedures (SOP) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Tutur Umi Hanik, Koordinator Satgas PPA:

"Ada bukunya SOP. Setiap satgas dikasih, dari kabupaten."[83]

Namun, Program kegiatan perlindungan perempuan tahun 2020 ini belum di analisis responsif gender. Seperti yang di ungkapkan oleh Fiyanti Soeci Hidayanti Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

"Untuk program perlindungan perempuan ini tidak, tapi kedepannya mestinya memang haru di teliti lagi untuk kegiatan-kegiatan apa yang yang tetap bisa untuk dilakukan pemetaan perspektif gendernya."[84]

---

[81] Ummi Hanik, Koordinator kecamatan kepohbaru: Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bojonegoro, hasil wawancara, 21 Juni 2021
[82] Abdullah ramdhani,Ibid., hal.5
[83] Ummi Hanik, Koordinator kecamatan kepohbaru: Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bojonegoro, hasil wawancara, 21 Juni 2021
[84] Fiyanti Soeci Hidayanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Hasil wawancara, 16 Juni 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara keseluruhan, jika dianalisis dengan menggunakan model implementasi Kebijakan Edward III sudah efektif dan efisien diterapkan di masyarakat. Terbentuknya Satgas PPA merupakan strategi PUG dalam membuka akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dari kebijakan. Dengan adanya satgas PPA, perempuan-perempuan lebih berani menyuarakan hak-haknya, hal inilah menjadi faktor mengapa setelah ada satgas PPA kasus kekerasan meningkat. Karena perempuan lebih berani untuk melapor terkait kasus yang dialami. Terutama di pedesaan, masyarakat cenderung memilih diam jika ada kasus-kasus kekerasan seperti KDRT. Padahal kasus seperti KDRT inilah yang menjadikan kesenjangan-kesenjangan gender. Akhirnya, setelah ada satgas PPA, masyarakat mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, alur pelaporan serta solusi-solusi mengatasi permasalahan. Dan lebih berani untuk *speak up*. Saat ini yang menjadi Faktor Penghambat yaitu fenomena global, yaitu Covid-19, para satgas mengalami kendala dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena tidak ada kegiatan perempuan-perempuan di desa. Sehingga sulit untuk bersosialisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data dan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Tujuh prasyarat yang menjadi acuan kelembagaan Pengarusutamaan Gender di kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Dari segi Sumber daya, masih terdapat kendala-kendala seperti pemahaman pejabat yang masih bias gender dan rotasi jabatan maupun mutasi pegawai. Tak hanya itu, meskipun sudah melakukan analisis gender menggunakan alat analisis, namun tidak seluruh pejabat bisa menganalisis dan masih minim data terpilah gender. Yang sudah berjalan dengan baik yaitu adanya Komitmen, Kebijakan dan kelembagaan dibuktikan dengan dibentuknya kelompok kerja PUG, *Focal Point Gender* di seluruh OPD, dan Satuan Tugas PPA. Serta Partisipasi, Partisipasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Bojonegoro Institute bersama kelompok perempuan yang tergabung dalam program SPEAK menghasilkan output yang berdampak positif dalam keberlangsungan pembangunan.
2. Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui satuan tugas PPA dalam mencegah dan melindungi perempuan dan anak dapat dilihat dari model implementasi Kebijakan Edward III sudah efektif dan efisien diterapkan di masyarakat. Komunikasi antar internal program berjalan secara efektif dan tepat sasaran, sumber daya dan sikap birokrasi juga sangat bagus, meskipun dengan sukarelawan mereka tetap berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan program. Serta adanya SOP juga mempermudah mereka dalam menjalankan tugas dan wewenang.

B. SARAN

Berdasarkan paparan data dan kesimpulan, untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pengarusutamaan gender dan implementasi kebijakan, maka peneliti memberikan saran dan rekomendasi, antara lain:

1. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Daerah dan Kualitas Hidup perempuan, minimal harus terpenuhinya 7 prasyarat PUG. Meskipun terdapat titik-titik kelemahan di setiap indikator prasyarat PUG, terkait masalah rotasi dan mutasi jabatan, yang selama ini menjadi faktor penghambat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengarusutamaan gender. Pemerintah Daerah, harus mengoptimalkan pemahaman gender kepada seluruh OPD sehingga bukan hanya yang menjadi *Focal Point Gender* dan Kelompok Kerja PUG saja yang paham, tetapi juga seluruh pejabat harus memahami hal tersebut.

2. Perlu adanya peningkatan-peningkatan kinerja yang dilakukan oleh satuan tugas PPA, harus ada inovasi-inovasi baru, agar seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro mengetahui bahwa ada satgas PPA. Karena sosialisasi hanya dilakukan di kelompok-kelompok perempuan, sebaiknya harus tersampaikan juga kepada masyarakat sipil/perorangan. Karena tidak semua perempuan tergabung dalam kelompok/organisasi perempuan. Sehingga seluruh masyarakat menerima manfaat dari adanya Satuan Tugas PPA. Serta sebelum terbentuknya program kerja harus di analisis responsif gender terlebih dahulu, agar penduduk laki-laki dan perempuan mempunyai manfaat yang sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Abdoellah, Awan Y., Rusfiana, Yudi. 2016. *Teori & Analisis kebijakan Publik,* Bandung: Alfabeta.

Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik* Bandung:Pustaka Setia.

Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

BAPPENAS, *Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG) Kajian awal*, (Jakarta:Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,2012

Departemen pendidikan Nasional,2008. *Kamus Bahasa Indonesia*,Jakarta:Pusat Bahasa.

Fakih,Mansour. 1996. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2016. *Road Map: Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)*

Milles dan Huberman, 1992.*Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press

Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik:Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002,* Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

S. Margono, 2004. *Metode Penelitian Pendidikan,* Jakarta: Rineka Cipta

Setiawan, Conny R. 2010.*Metode Penelitian Kualitatif,* Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Subianto, Agus.2020. *Kebijakan Publik:Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan* Evaluasi, Surabaya: Brilliant.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung:Alfabeta,

Tachjan, 2006. *Implementasi kebijakan Publik*, Bandung: AIPI

Taufiqurokhman,2014. *Kebijakan Publik:Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintah* Jakarta:Universitas Moestopo Beragama Pers

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*,Jakarta:Media Pressindo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jurnal dan Website

Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*, Jurnal:Administrasi Publik, Vol.1 No,1.

Antasari,Rr. Rina 2017 *Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender di Pemerintah Kota Palembang*, Jurnal:Al-Maiyyah Nomor 1.

Arisaputra,Muhammad Ilham. 2013. *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia*,Jurnal:Yuridikam Vol.28 No.2.

Badan Pusat Statistik. *[IPG] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2010-2019.* https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15 /1568/-ipg-indeks-pembangunan-manusia-ipm- menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2019.html.

Cholil, Mufidah, 2011 *Profil Gender Kabupaten Bojonegoro tahun 2011*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim.

Dinas Komunikasi dan Informatika, *Pemkab Gelar Bimtek Untuk Optimalkan Peran Satgas PPA se Kab. Bojonegoro,* https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/615

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana, *Bu Anna Kukuhkan 1.600 Satgas PPA.* http://dp3akb.bojonegorokab.go.id/berita/baca/32.

Famelasari, Resya., Prastiwi, Juwita Hayyuning. 2021. *Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Tambang di Bojonegoro*,(Jurnal: Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 6 no.1

Hasanah, Siti Nur. Skripsi.2019. *Evaluasi Anggaran Responsif Gender (Studi Kasus Program Strengthening Publik Services Through The Empowerment Of Women-Led Advocacy And Social Audit Networks dalam Mengadvokasi Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro oleh LSM Bojonegoro)* (Malang:Universitas Brawijaya.

Herawati, Safira. Skripsi. *Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gresik:Studi Kasus Musyawarah Rencana Pembangunan Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2019,* Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2020

Jumiati, 2014. *Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pengelolaan Kerajinan Tenun Silungkang di Nagari Silungkakng Kota Sawahlunto,* Jurnal:Tingkap, Volume X nomor 2.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pentingnya Peran Perempuan Sebagai Kekuatan Bangsa Perangi Covid-19*,http://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2646/pentingnya-peran-perempuan-sebagai-kekuatan-bangsa-perangi-covid-19.

Kementerian PPN/BAPPENAS, *Kertas Kebijakan: Pengarusutamaan Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim (PUG-API) & Kajian Awal: Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG),* 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/228/KEP/412.11/2015 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bojonegoro

Kertanti, Indra. 2019. *Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Semarang*, Jurnal: RIPTEK Vol 13 no.1

Kuswan, Dan. Sepanjang 2020, *di Kabupaten Bojonegoro Terdapat 612 Pernikahan di Bawah Umur*, https://kumparan.com/beritabojonegoro/sepanjang-2020-di-kabupaten-bojonegoro-terdapat-612-pernikahan-di-bawah-umur-1uwIEDMgeqx/full,

Muadi, Sholih. 2016. *Konsep Teori Perumusan Kebijakan Publik*, Jurnal Review Politik, Volume 6, Nomor 2.

Mujahidah, 2010. *Dinamika Gender dan Peran Perempuan dalam ekonomi Keluarga*,(Jurnal:Al-ulum, Vol,10 No.1.

Nuraini,Zahrotun. Skipsi. *Implementasi Kebijakan Mendirikan Bangunan*, Malang:Universitas Brawijaya,2017.

Nurani, Dwi. Thesis. *Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Jakarta Selatan*. Jakarta: Universitas Indonesia,2009

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, *RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023.*

Rahayu, Wewen Kusumi. 2016. *Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)*. Jurnal:Analisis dan Pelayanan Publik Vol 2, No.1.

Suhra, Sarifa. 2013. *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-qurán dan implikasinya terhadap hokum Islam*, Jurnal:Al-Ulum,Volume 13 No.2,2013

Ramdhani, Abdullah., Ramdhani, Muhammad Ali. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal: Publik, Vol.11 No.01.

Wenham, C., Smith, J., Morgan, R., & Group, W. *COVID-19: the gendered impacts of the outbreak. The Lancet, 395, 846–848.* https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32990-3

Wiasti, Ni Made. 2017.*Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)*, Jurnal: Sunari Penjor Volume 1, No.1.

Wongkar, Bryan Christo, dkk. 2019. *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Tahun 2018*. Jurnal: Administrasi Publik volume V nomor 086

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil Wawancara:

Anugrah,Yaseriza. Kepala sub bidang pembangunan manusia:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, hasil wawancara 08 April 2021

Aprilliati, Lilis. Budget Advocacy Officer:Bojonegoro Institute. Hasil wawancara, 06 Juni 2021

Hanik, Ummi. Koordinator kecamatan kepohbaru: Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bojonegoro, hasil wawancara, 21 Juni 2021

Hidayanti, Fiyanti Soeci. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Hasil wawancara, 16 Juni 2021

Maspriadi, Sub bidang perencanaan dan pendanaan:Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojoengoro Hasil wawancara, 09 April 2021

Zunaedi, Kepala Sub bidang pengendalian dan evaluasi dan pelaporan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, hasil wawancara 09 April 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id